



**RANCANGAN AKSI PERUBAHAN
KINERJA ORGANISASI**

**PENANGGULANGAN TBC MELALUI PERCEPATAN PENYUSUNAN
TIM ELIMINASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Oleh:

IRA PRIMADESA OGATYAH, S.Si, M.Kes
NIP 197412182003122004
NDH: 15

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN I
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**RANCANGAN AKSI PERUBAHAN
KINERJA ORGANISASI**

**PENANGGULANGAN TBC MELALUI PERRCEPATAN PENYUSUNAN
TIM ELIMINASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Oleh:

**IRA PRIMADESA OGATIAH,S.Si.M.Kes
NIP 197412182003122004
NDH: 15**

Telah disetujui untuk diseminarkan pada:
Hari/Tanggal : RABU, 30 APRIL 2025
Tempat : BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Coach,

Mentor

**DR. Ir. Hj. Eva Novaria, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196711111998032002**

**Fery Fahrizal,SKM,MKM
Pembina Tingkat I
NIP 196802191990031001**

Menyetujui :
**a.n. Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Kepala Bidang
Pengembangan Kompetensi Manajerial**

**Tri Hartanti, SE., M.Si.
Pembina / IV.a
NIP. 197212192006042006**

KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab besar dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan, Dinas Kesehatan memerlukan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien guna memastikan bahwa setiap usulan yang diajukan oleh penanggung jawab program melalui rapat anggaran dapat diprioritaskan dengan tepat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu terobosan inovasi yang dapat mendukung upaya penanggulangan TBC. Oleh karena itu, sesuai asta cita dan quick win Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, percepatan penyusunan Tim eliminasi TBC di Provinsi Sumatera Selatan menjadi bagian yang sangat penting dari rencana perubahan ini.

Aksi perubahan ini juga bertujuan untuk memberikan perubahan dan inovasi dalam menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit TBC di tingkat daerah Provinsi Sumatera Selatan dan mendukung program pemerintah Indonesia untuk mewujudkan eliminasi TBC pada tahun 2030.

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan perubahan serta menjadi alat yang bermanfaat untuk mendukung keberhasilan transformasi organisasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit TBC

Penulisan Aksi Perubahan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Sehingga dengan tersusunnya laporan ini kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak H. Herman Deru, SH., MM, selaku Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Edwar Juliartha, S.Sos, MM selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Penguji.
3. Bapak H. Fery Fahrizal, SKM., MKM selaku mentor dan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
4. Ibu Dr.Ir. Hj. Eva Novaria, M.Si sebagai coach Rancangan Aksi Perubahan

5. Para Widyaiswara BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
6. Ibu Tri Hartati, SE. M.Si Kepala Bidang PK Manajerial BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
7. Tim Manajemen Mutu BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
8. Stakeholder dan Tim Koordinasi Eliminasi TBC.
9. Panitia Penyelenggara dari BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga Aksi Perubahan ini dapat tersusun.

Aksi Perubahan ini adalah hasil pelaksanaan implementasi kegiatan yang saya lakukan sebagai Peserta PKA Angkatan 1 Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan. Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Demikian Laporan ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terima kasih.

Palembang, Juli 2025

Penulis

Ira.P.Ogatiyah,S.Si.M.Kes

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix

BAB I. RANCANGAN AKSI PERUBAHAN	HALAMAN
A. PENDAHULUAN	
1. LATAR BELAKANG	1
2. TUJUAN AKSI PERUBAHAN	4
3. MANFAAT AKSI PERUBAHAN	5
4. RUANG LINGKUP AKSI PERUBAHAN	5
B. ANALISIS MASALAH	
1. PROFIL KINERJA ORGANISASI	5
2. ANALISIS MASALAH KINERJA ORGANISASI	8
C. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	9
1. TEROBOSAN INOVASI	9
2. MILESTONE KEGIATAN AKSI PERUBAHAN	11
3. SUMBER DAYA	13
4. PEMETAAN STAKEHOLDER	14
5. STRATEGI KOMUNIKASI UNTUK STAKEHOLDER	16
D. MANAJEMEN RESIKO	17
E. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM AKSI PERUBAHAN	19
F. PEMETAAN SIKAP PERILAKU DAN RENSTRA PPD	20
A. HASIL PEMETAAN	20
B. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	25
BAB II. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	
A. MEMBANGUN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	40
B. PENGELOLAAN BUDAYA KERJA	41
C. MEMBANGUN JEJARING DAN KOLABORASI	43

D. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI	45
BAB III. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	
A. CAPAIAN DAN BUKTI PERBAIKAN KINERJA ORGANISASI	48
- MILESTONE JANGKA PENDEK	48
- MILESTONE JANGKA MENENGAH	49
- MILESTONE JANGKA PANJANG	49
B. MANFAAT AKSI PERUBAHAN	55
C. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI	
AKSI PERUBAHAN	56
BAB IV. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	59
BAB V. KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	62
BAB VI, DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	65
A. PENERAPAN STRATEGI KOMUNIKASI	65
B. KEBERHASILAN MENDAPAT DUKUNGAN ADOPSI/ REPLIKASI AKSI PERUBAHAN	66
BAB VII. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	68
BAB VIII. PENUTUP	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tujuan Rencana Aksi Perubahan.....	4
Tabel 1.2 Analisis USG.....	6
Tabel 1.3 Jadwal Pelaksanaan Milestone.....	13
Tabel 1.4 Identifikasi Stakeholder.....	13
Tabel 1.5 Matriks Identifikasi Resiko.....	17
Tabel 1.6 Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan.....	19
Tabel 1.7 Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri.....	25
Tabel 3.1 Milestone Jangka Pendek.....	48
Tabel 3.2 Milestone Jangka Menengah.....	49
Tabel 3.3 Milestone Jangka Panjang.....	50
Tabel 3.4 Manfaat Aksi Perubahan.....	56
Tabel 3.5 Pengembangan Kompetensi Aksi Perubahan.....	57
Tabel 4.1 Keberlanjutan Aksi Perubahan.....	59
Tabel 5.1 Keterkaitan Mata Pelatihan dengan Aksi Perubahan.....	63
Tabel 7.1 Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri.....	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Peta Jalan Eliminasi.....2
Gambar 1.2	Target utama penanggulangan TBC.....3
Gambar 1.3	Analisis Fishbone.....7
Gambar 1.4	Alur Pikir Manajemen Perubahan.....9
Gambar 1.5	Peta Diagram Milestone.....12
Gambar 1.6	Pemetaan Stakeholder..... 15
Gambar 2.1	Peta Stakeholder Sebelum dan Setelah Aksi Perubahan..... 45
Gambar 4.1	Surat Dukungan Keberlanjutan dari Mentor.....61

RINGKASAN EKSEKUTIF

TBC atau Tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru-paru dan organ lainnya. Penularan melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin atau berbicara. Gejala TBC seperti batuk kronis yang berlangsung lebih dari dua minggu, demam yang berlangsung lama, kelelahan yang berlebihan dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Pengobatan TBC menggunakan obat anti TBC yang harus diminum selama 6 bulan dan pengawasan yang ketat dari tenaga pendamping obat. Pencegahan TBC dilakukan dengan Vaksinasi BCG pada anak-anak, penggunaan masker dan perilaku hidup bersih sehat serta kebersihan lingkungan. Indonesia saat ini menempati peringkat ke dua di dunia berdasarkan estimasi insiden TBC dengan estimasi 969.000 kasus. Pada tahun 2024, Indonesia berhasil menotifikasi 884.980 kasus TBC dengan 11.900 kasus diantaranya merupakan kasus TB RO (tuberkulosis resisten obat). Namun demikian hanya 9195 pasien (77 %) yang memulai pengobatan.

Percepatan Eliminasi TBC dilaksanakan melalui 6 strategi penanggulangan yang tercantum dalam Stranas Penanggulangan Tuberkulosis 2020-2024 dan Peraturan Presiden RI nomor 67 tahun 2021. Strategi 1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC 2030. Strategi 2. Peningkatan akses layanan tuberkulosis bermutu dan berpihak pada pasien. Strategi 3. Optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan tuberkulosis serta pengendalian infeksi. Strategi 4. Pemanfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis dan tata laksana tuberkulosis. Strategi 5. Peningkatan peran serta komunitas, mitra dan multisektor lainnya dalam eliminasi tuberkulosis. Strategi 6. Penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan.

Aksi perubahan yang saya laksanakan mendukung strategi nasional tuberkulosis nomor 1 yaitu penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk percepatan eliminasi TBC 2030. Bertujuan jangka pendek yaitu pembentukan SK Gubernur tentang Tim Koordinasi Eliminasi. Jangka Menengah yaitu penyusunan draft RAD Perda dan tujuan jangka panjang adalah pembentukan Perda TBC di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan analisis USG didapatkan beberapa akar masalah yang dirumuskan menggunakan fishbone dan pemetaan stakeholder serta manajemen resiko diharapkan mendukung eliminasi TBC di tahun 2030.

BAB I

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

A. PENDAHULUAN

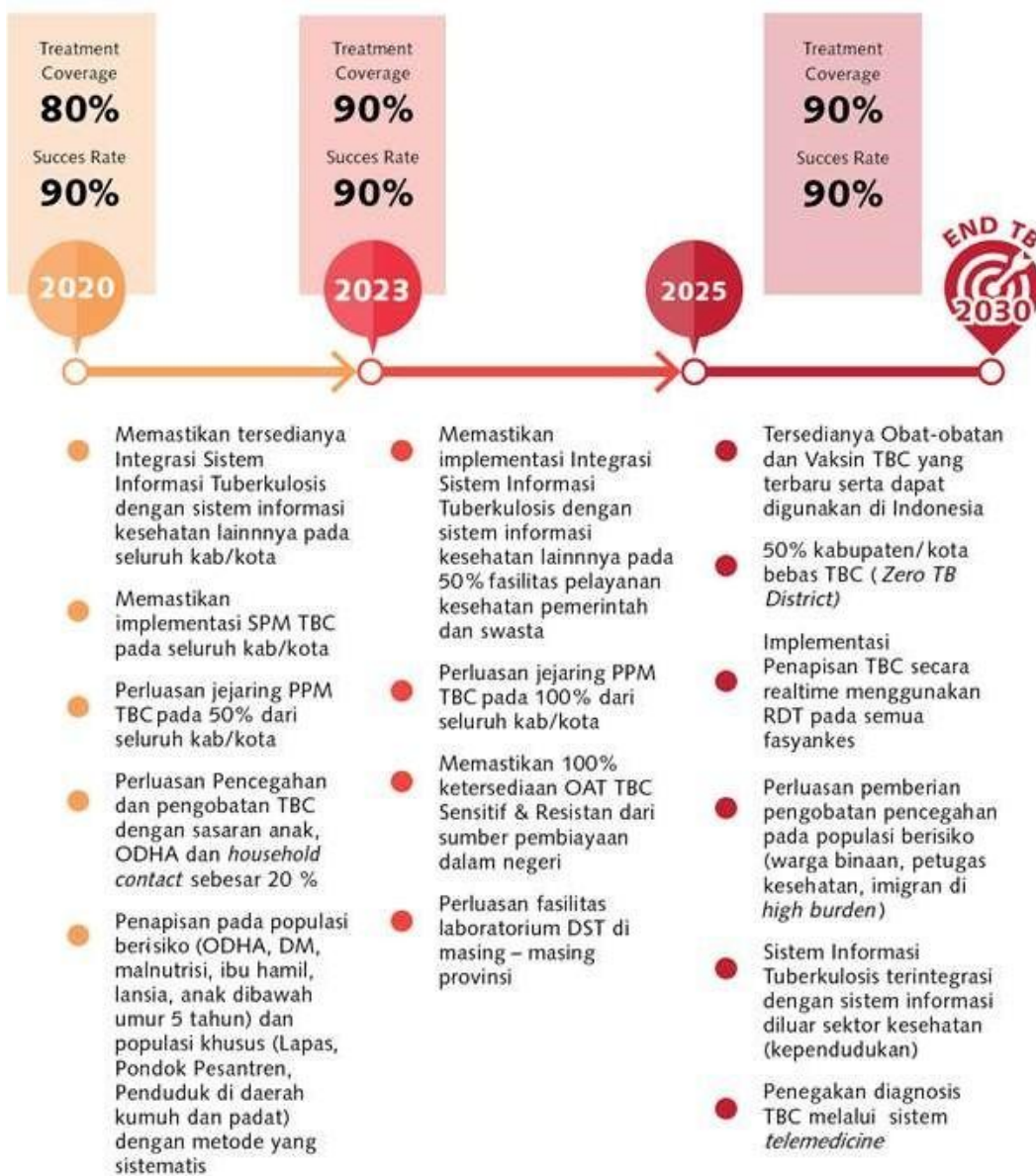
1. LATAR BELAKANG

Bidang kesehatan termasuk dalam Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran nomor lima yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia dengan fokus pada sains, teknologi, pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender. Selain itu memiliki tiga program quick win Prabowo Gibran di bidang kesehatan yaitu: (1) Skrining kesehatan, program ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit sejak awal, sehingga pengobatan bisa dilakukan lebih cepat dan mengurangi angka kematian akibat Penyakit yang sebenarnya bisa dicegah (2) pembangunan rumah sakit di daerah tertinggal, program ini bertujuan untuk pemeratakan layanan kesehatan dan menyediakan sarana untuk Eliminasi TBC dan skrining kesehatan (3) Penanganan tuberkulosis, program ini bertujuan untuk mengurangi angka kematian akibat TBC dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketiga program ini diharapkan dapat dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan dan dapat menjadi program strategis di bidang kesehatan.

Berdasarkan Survei Prevalensi TBC 2013-2014, proporsi partisipan yang mengetahui gejala utama TBC sebesar 78,6%, cara penularan TBC sebesar 69,1%, dan TBC dapat disembuhkan sebesar 73,5%. Hanya sebagian kecil yang mengetahui bahwa obat TBC gratis (21,3%). Stigma yang ditunjukkan dengan sikap merahasiakan keluarga yang terkena TBC masih tinggi (11,7%). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penyakit TBC masih perlu ditingkatkan.

Peta Jalan Eliminasi TBC

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah membuat Lini Waktu dan Tonggak Pencapaian(milestone) Menuju Eliminasi TB 2030 diilustrasikan dalam Gambar 1.1 Peta Jalan Eliminasi



Mengapa TBC Perlu Dieliminasi?

Merujuk pada dokumen Peta Jalan Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia 2020-2030 terdapat poin penting mengapa TBC perlu di eliminasi di Indonesia, yaitu:

1. Tuberkulosis menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian pasien dan keluarga akibat morbiditas dan mortalitas Tuberkulosis, hingga perekonomian nasional secara keseluruhan.
2. Pengobatan Tuberkulosis dan Tuberkulosis Resistan Obat membutuhkan waktu yang lama dan terkadang disertai penurunan status kesehatan.
3. Stigma dan diskriminasi Tuberkulosis masih merupakan halangan dalam

pemeriksaan, diagnosis, dan pengobatan Tuberkulosis. Tidak hanya stigma dan diskriminasi yang mungkin didapat dari tenaga kesehatan, keluarga, rekan kerja, dan anggota komunitas lain yang diikuti, kepercayaan diri yang rendah pada orang dengan Tuberkulosis juga merupakan halangan akses untuk menerima layanan Tuberkulosis.

- Indonesia telah berkomitmen untuk mengakhiri epidemi Tuberkulosis seperti yang dinyatakan dalam Sustainable Development Goals dan End Tuberculosis Strategy. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perlu mengembangkan peta jalan untuk mencapai tujuan eliminasi Tuberkulosis di tahun 2030.

Gambar 1.2 Target utama penanggulangan TBC tahun 2020- 2024



Dari penjelasan diatas didapatkan bahwa Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Indonesia berada di peringkat kedua dunia dengan kasus TBC terbanyak setelah India. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, jumlah kasus TBC di Indonesia pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga Januari 2024, tercatat sebanyak 860.100 kasus TBC di Indonesia. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang mencatat sekitar 821.200 kasus. Untuk mempercepat eliminasi TBC, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan terintegrasi dari berbagai pihak. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Tim percepatan eliminasi TBC di tingkat daerah melalui Draft Surat Keputusan (SK) yang efektif dan

Draft penyusunan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung upaya penanggulangan TBC di tingkat daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. TUJUAN AKSI PERUBAHAN

Tujuan umum disusunnya Rancangan Aksi Perubahan ini adalah untuk memberikan perubahan dan inovasi dalam menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat Penyakit TBC di tingkat daerah Provinsi Sumatera Selatan dan mendukung program pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Eliminasi TBC pada tahun 2030. Secara bertahap tujuan dari Rancangan Aksi Perubahan ini meliputi 3 (tiga) tujuan yaitu :

1. Jangka Panjang (dilaksanakan dalam waktu 1 – 2 tahun setelah diklat).
2. Jangka Menengah (dilaksanakan dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun setelah diklat)
3. Jangka Pendek (dilaksanakan dalam kurun waktu 2 Bulan).

Secara rinci menurut tahapan tujuan dari Rencana Aksi Perubahan ini adalah :

Tabel 1.1 Tujuan Rencana Aksi Perubahan

NO	TAHAPAN	TUJUAN
1	Jangka Panjang	Pembentukan Perda TBC di Provinsi Sumatera Selatan
2	Jangka Menengah	Penyusunan rancangan Perda TBC
3	Jangka Pendek	Pembentukan SK Gubernur tentang Tim Koordinasi Percepatan Eliminasi TBC

3. MANFAAT AKSI PERUBAHAN

Manfaat dari Aksi Perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi individu :
 1. Mengurangi resiko penularan dan Meningkatkan kualitas hidup
- b. Bagi organisasi :
 1. Tersusunya tim percepatan dan rancangan Perda eliminasi TBC
- c. Bagi masyarakat :
 1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan TBC

4. RUANG LINGKUP AKSI PERUBAHAN

Ruang Lingkup laporan aksi perubahan diharapkan Organisasi Perangkat Daerah mampu melakukan pelatihan penyusunan SK Tim Percepatan Eliminasi TBC bagi staf Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan pihak stakeholder terkait. Adapun yang akan dilaksanakan dibuktikan dengan eviden adalah kegiatan jangka pendek.

B. ANALISIS MASALAH

1. PROFIL KINERJA ORGANISAS

Dinas Kesehatan dan Pemerintah daerah sebagai leading sector dalam penanggulangan TBC perlu memastikan bahwa SK Tim percepatan eliminasi TBC disusun dengan baik, mencakup peran dan tanggung jawab yang jelas, serta mekanisme kerja yang efektif. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan penanggulangan TBC. Ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016. Perda penanggulangan TBC yang baik akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program penanggulangan TBC, termasuk alokasi anggaran, koordinasi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan ini diadakan untuk meningkatkan kapasitas staf pemerintah daerah dalam menyusun Draft rancangan Perda penanggulangan TBC dan meningkatkan kapasitas staf Dinas Kesehatan dalam menyusun SK Tim percepatan eliminasi TBC.

Dari penjelasan di atas didapatkan tiga identifikasi isu atau masalah yaitu :

- 1. Belum adanya SK Tim Percepatan Eliminasi dan Draft Perda TBC**
- 2. Kurangnya Skrining kesehatan pada pasien TBC**

3. Belum maksimal pembangunan rumah sakit di daerah tertinggal dan menyediakan sarana untuk Eliminasi TBC.

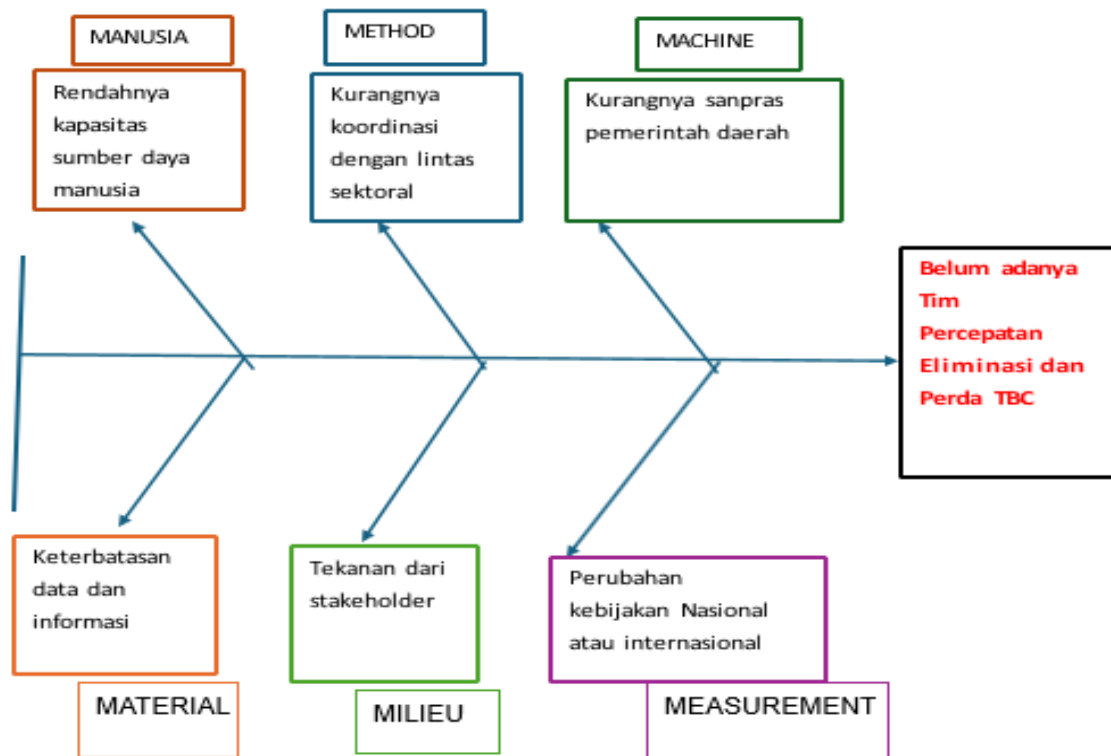
Dengan 3 masalah tersebut kita analisis menggunakan **analisis USG** :

Tabel 1.2 Analisis USG

ISU	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Skor total (U+S+G)	Alasan dan Ranking
Belum adanya SK Tim Percepatan Eliminasi dan Draft Perda TBC	5	5	5	15	Pentingnya kerjasama tim dalam penanganan TBC (I)
Kurangnya Skrining kesehatan pada pasien TBC	4	5	4	13	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (II)
Belum maksimal pembangunan RS di daerah tertinggal dan menyediakan sarana untuk Eliminasi TBC	3	4	3	10	Masyarakat mudah untuk mengakses pelayanan kesehatan (III)

Dari hasil analisis USG di atas, **ditetapkan satu core isu (isu terpilih) yaitu Belum adanya Draft SK Tim Percepatan Eliminasi dan Draft Perda TBC** dengan skor total nilai adalah 15 dengan alasan pentingnya kerjasama tim dalam penanganan TBC. Selanjutnya kita melakukan analisis faktor penyebab masalah dari core isu menggunakan **fishbone**.

Gambar 1.3 Analisis Fishbone



ANALISIS DAMPAK MASALAH

Analisis dampak masalah jika tidak diselesaikan yaitu:

- Keterlambatan implementasi
- Keterlambatan dalam pencapaian program TBC
- Pengulangan pengetikan dokumen
- Keterlambatan dalam mencapai tujuan organisasi.
- Keterlambatan menerima dokumen
- Terhambatnya tujuan pembentukan Draft SK Tim

Dengan matriks identifikasi risiko, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dapat mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko yang terkait dengan implementasi penyusunan SK Tim Percepatan Eliminasi TBC serta mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengantisipasi risiko tersebut.

2. ANALISIS MASALAH KINERJA ORGANISASI

Dengan adanya implementasi penyusunan SK Tim Percepatan Eliminasi TBC di provinsi Sumatera Selatan akan mempengaruhi capaian program kesehatan seperti

penanganan penyakit TBC, dimana target pemerintah Indonesia bebas TBC di tahun 2030. Kendala yang dihadapi oleh pengelola program TBC antara lain :

- a. Belum menguasai detail keseluruhan program TBC
- b. Pengelola program TBC di kabupaten/kota masih selalu koordinasi dengan tim provinsi, sehingga program TBC belum maksimal.
- c. Belum bisa mengambil keputusan jika ada petugas Fasyankes yang melakukan konsultasi.

Untuk mengatasi kendala di atas, dapat dilakukan dengan berbagai strategi meningkatkan efisiensi sehingga capaian program bidang kesehatan khususnya penanganan penyakit TBC tercapai, seperti :

- a. Perencanaan yang baik
Dengan perencanaan yang baik dapat membantu mengurangi biaya yang tidak efisien dalam kegiatan .
- b. Penggunaan teknologi
Penggunaan teknologi seperti zoom untuk rapat internal dan eksternal

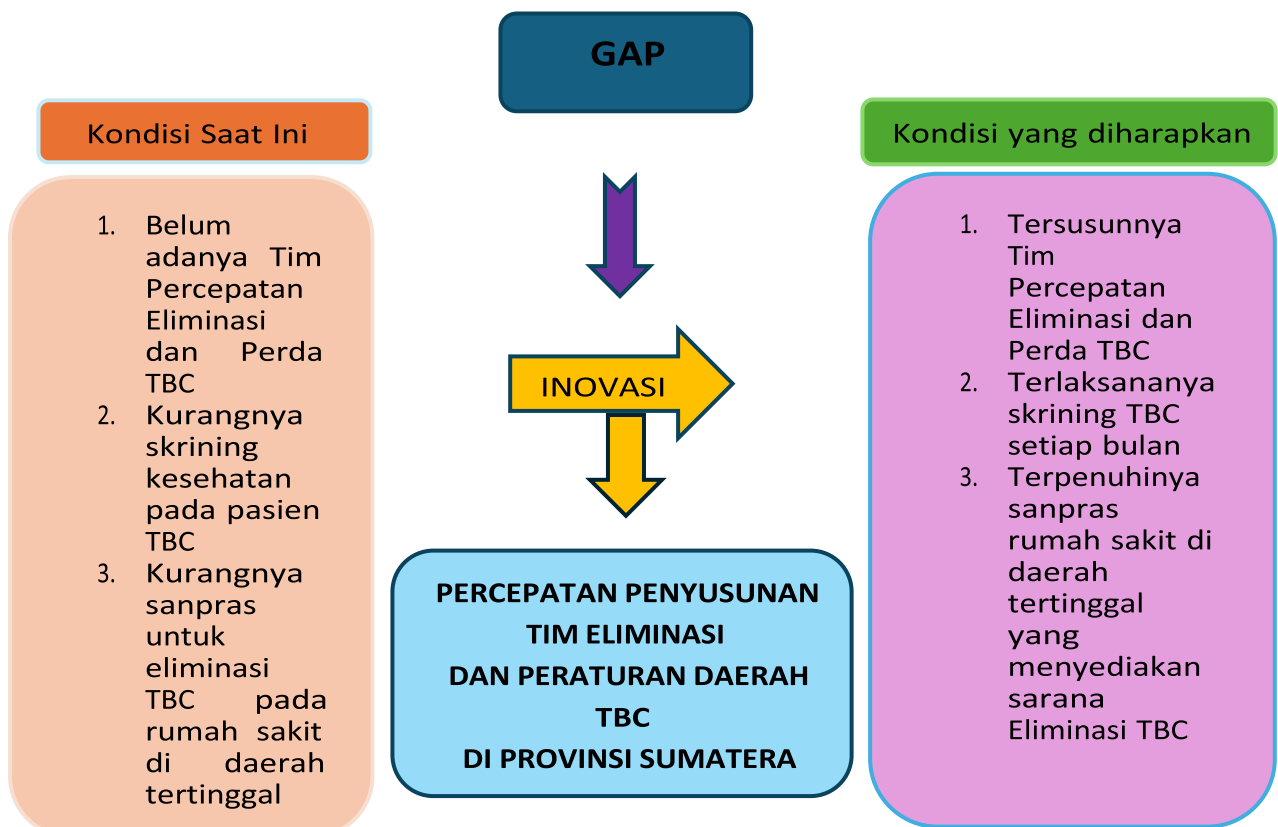
- c. Penghematan biaya,
Penghematan biaya dapat dilakukan dengan memilih akomodasi dan transportasi yang lebih murah
- d. Pengawasan yang ketat
Pengawasan yang ketat dapat membantu mengurangi penyalahgunaan biaya kegiatan program.

C. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

1. TEROBOSAN INOVASI

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas menyusun rencana, memonitor dan pemantauan pelaksanaan kegiatan program TBC. Namun dalam proses kegiatannya masih dirasa belum maksimalnya pengelolaan data-data dan informasi sebagai bahan penyusunan SK Tim Percepatan Eliminasi TBC

Gambar 1.4 Alur Pikir Manajemen Perubahan



Adapun gambaran kondisi eksisting dan kondisi yang diharapkan serta inovasi untuk menyelesaikan GAP yang ada adalah sebagai berikut:

a. Kondisi Eksisting Saat ini

1. Belum adanya SK Tim Percepatan Eliminasi dan Draft Perda TBC
2. Kurangnya Skrining kesehatan pada pasien TBC
3. Belum maksimal pembangunan rumah sakit di daerah tertinggal dan menyediakan sarana untuk Eliminasi TBC.

b. Kondisi yang diharapkan

1. Tersusunnya SK Tim Percepatan Eliminasi dan Draft Perda TBC
2. Terlaksananya Skrining kesehatan pada pasien TBC
3. Meratanya pembangunan rumah sakit di daerah tertinggal dan menyediakan sarana untuk Eliminasi TBC.

c. Pemasalahan (Gap)

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Indonesia berada di peringkat kedua dunia dengan kasus TBC terbanyak setelah India. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, jumlah kasus TBC di Indonesia pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hingga Januari 2024, tercatat sebanyak 860.100 kasus TBC di Indonesia. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang mencatat sekitar 821.200 kasus. Untuk mempercepat eliminasi TBC, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan terintegrasi dari berbagai pihak. Salah satu langkah penting adalah pembentukan tim percepatan eliminasi TBC di tingkat daerah melalui Surat Keputusan (SK) yang efektif dan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung upaya penanggulangan TBC di tingkat daerah.

Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah sebagai leading sector dalam penanggulangan TBC perlu memastikan bahwa SK tim percepatan eliminasi TBC disusun dengan baik, mencakup peran dan tanggung jawab yang jelas, serta mekanisme kerja yang efektif. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan penanggulangan TBC. Ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016. Perda penanggulangan TBC yang baik akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah

dalam melaksanakan program-program penanggulangan TBC, termasuk alokasi anggaran, koordinasi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan ini diadakan untuk meningkatkan kapasitas staf pemerintah daerah dalam menyusun rancangan Perda penanggulangan TBC dan meningkatkan kapasitas staf Dinas Kesehatan dalam menyusun SK tim percepatan eliminasi TBC.

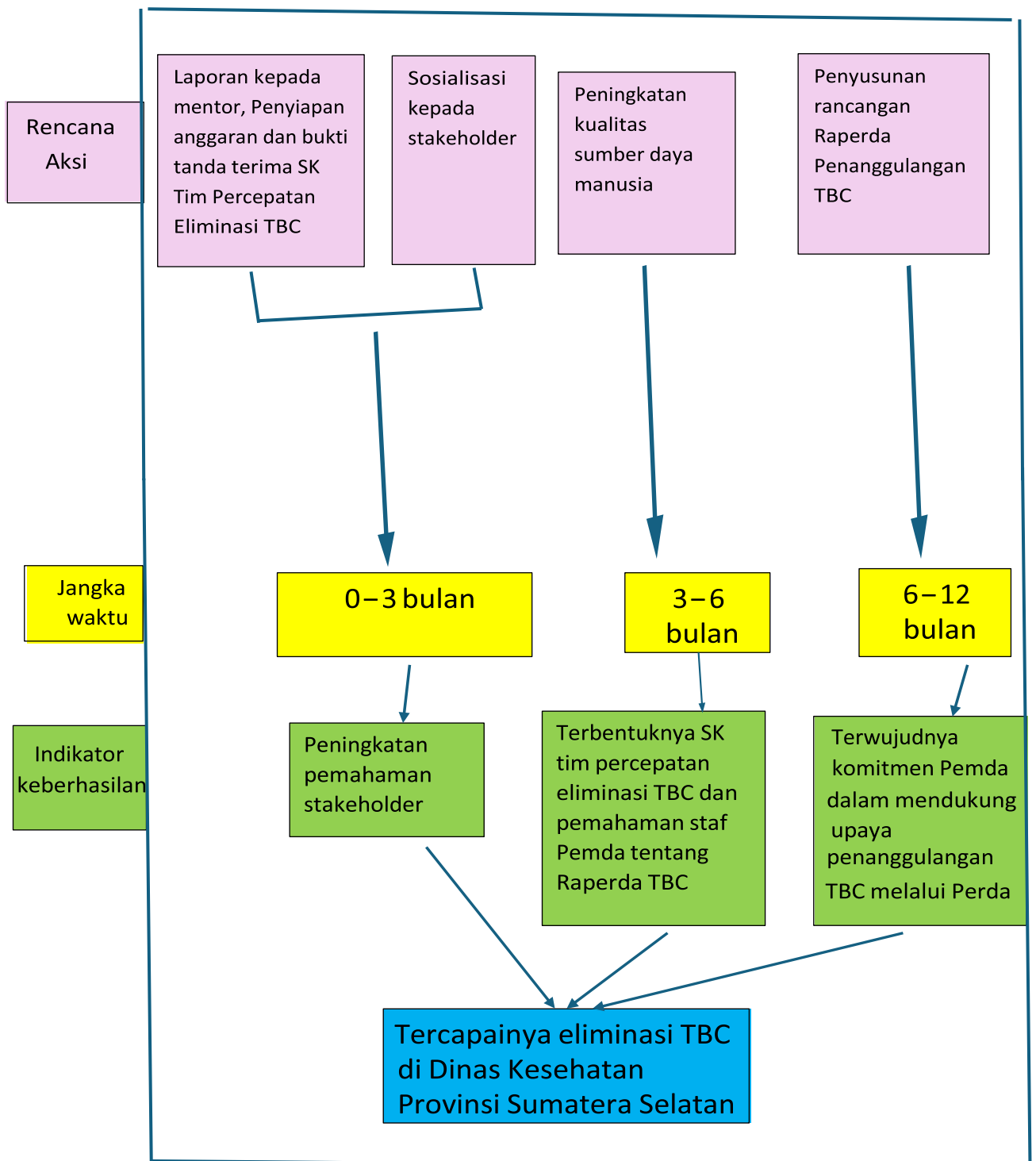
2. MILESTONE KEGIATAN AKSI PERUBAHAN

Milestone dan kegiatan aksi perubahan dalam upaya penanggulangan TBC :

1. Penyiapan anggaran dan metode sosialisasi kepada masyarakat dan bukti tanda terima draft SK Tim Percepatan Eliminasi TBC dari biro hukum dengan jangka waktu 0 – 3 bulan dengan indikator keberhasilan peningkatan pemahaman masyarakat
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan jangka waktu 3 – 6 bulan dengan indikator keberhasilan terbentuknya SK Tim percepatan eliminasi TBC yang efektif di tingkat daerah dan pemahaman staf pemerintah daerah tentang Penyusunan Draft rancangan Perda penanggulangan TBC.
3. Penyusunan Draft rancangan Perda Penanggulangan TBC yang berkualitas di daerah dan sosialisasi ke kabupaten kota, dengan jangka waktu 6 – 12 bulan dengan Indikator keberhasilan Terwujudnya komitmen dari pemerintah daerah dalam mendukung upaya penanggulangan TBC melalui Peraturan Daerah (Perda).

Dari ke tiga sitem manajemen kinerja dalam upaya Penanggulangan TBC di atas, dapat dilihat pada diagram milestone sistem manajemen kinerja dalam upaya penanganan TBC sebagai berikut :

Gambar 1.5 Peta Diagram Milestone



Tabel 1.3 Jadwal Pelaksanaan Milestone

No	URAIAN	APRIL/ MINGGU KE-				MEI/ MINGGU KE-			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koordinasi dengan Mentor								
2	Koordinasi eksternal sekaligus Pembuatan SK Tim dan Penyusunan Jadwal Pelaksanaan								
3	Koordinasi, Reviu persiapan dan pelaksanaan sosialisasi lokasi ke-1(BAPPEDA)								
4	Koordinasi, Reviu persiapan dan pelaksanaan sosialisasi lokasi ke-2 (BAGIAN HUKUM)								
5	Koordinasi, Reviu persiapan dan pelaksanaan sosialisasi lokasi ke-3 (HUMAS PROTOKOL)								
6	Evaluasi pelaksanaan/Koordinasi/petunjuk Mentor								

3. SUMBER DAYA

Pemetaan stakeholder sangat penting untuk memastikan siapa saja yang terlibat dan apa peran mereka dalam mendukung atau menghalangi tujuan jejaring kerja ini.

Tabel 1.4 Identifikasi Stakeholder

Stakeholder	Deskripsi Peran	Pengaruh	Kepentingan	Potensi Mendukung	Potensi Netral	Potensi Resisten
INTERNAL						
Pejabat Dinas Kesehatan	Pengambil kebijakan Dan pengarah Sistem administrasi	Tinggi	Tinggi	✓		
Staf Administrasi	Pelaksana Langsung Kegiatan Program	Sedang	Tinggi	✓		

Pengawas Internal	Bertugas mengawasi dan memastikan program berjalan dengan baik	Sedang	Tinggi	✓		
EKSTERNAL						
Masyarakat	Penerima manfaat pelayanan kesehatan	Sedang	Tinggi	✓		
Lembaga Pemerintah	Pemangku kebijakan terkait kesehatan secara nasional.	Tinggi	Tinggi	✓		
Lembaga Non-Pemerintah	Organisasi yang Fokus pada kesehatan masyarakat	Sedang	Sedang	✓		✓

4. Pemetaan Stakeholder

Stakeholder dapat dibagi menjadi empat kategori berdasarkan pengaruh dan kepentingannya: Promoters, Latents, Defenders, Apathetics.

Gambar 1.6 Pemetaan Stakeholder



1. Promoters (Penggerak)

Stakeholder yang memiliki pengaruh besar dan kepentingan tinggi dalam layanan Dinas Kesehatan. Mereka adalah pihak yang sangat berperan dalam mendukung dan mendorong perubahan atau perbaikan sistem layanan.

- Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretaris Dinas Kesehatan adalah Pemangku kebijakan yang berperan penting dalam menentukan arah kebijakan, anggaran, dan infrastruktur untuk layanan kesehatan
- Staf Dinas Kesehatan adalah pelaksana kegiatan program kesehatan

2. Latents (Tertunda)

Stakeholder dengan kepentingan yang lebih rendah, namun memiliki potensi untuk mempengaruhi jika diberi perhatian lebih.

- Gubernur : Memiliki pengaruh yang tinggi dan berperan dalam kebijakan harian Dinas Kesehatan
- Walikota dan Bupati P: Meskipun mereka memiliki kepentingan terkait pelayanan kesehatan, mereka memiliki pengaruh yang lebih rendah dalam kebijakan harian Dinas Kesehatan, namun peran mereka tetap mendukung kebijakan nasional.
-

3. Defenders (Pembela)

Stakeholder yang memiliki kepentingan dalam sistem administrasi, tetapi dengan

pengaruh yang lebih kecil. Mereka mendukung kebijakan dan perubahan namun tidak selalu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi secara langsung.

- Beberapa Organisasi Non-Pemerintah: Organisasi yang mungkin terlibat dalam isu-isu kesehatan tetapi tidak secara langsung mempengaruhi sistem atau pelayanan Dinas Kesehatan
- Pengawas internal terlibat dalam pelaporan program kegiatan tapi tidak mempengaruhi pelayanan Dinas Kesehatan.

4. Apathetic

Stakeholder dengan pengaruh rendah dan kepentingan yang tidak terlalu besar terhadap pelayanan kesehatan. Mereka mungkin tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan atau perubahan kebijakan di Dinas Kesehatan

- Masyarakat yang Menjadi Penerima Manfaat: Mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi tidak terlalu terlibat dalam pengembangan kebijakan atau pengawasan layanan.
- Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan dengan secara langsung berhubungan ke masyarakat dan tidak terlalu terlibat dengan kebijakan Dinas Kesehatan

5. Strategi Komunikasi untuk Stakeholder

Salah satu aspek penting dalam membangun jejaring kerja adalah strategi komunikasi yang efektif. Di sektor publik, komunikasi harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan terstruktur untuk memastikan bahwa informasi dapat disampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat.

Strategi Komunikasi:

1. Terbuka: Komunikasi yang jujur dan informatif.
2. Terstruktur: Komunikasi disampaikan dengan cara yang sistematis dan mudah dipahami.
3. Bersemangat: Mengemas komunikasi dengan antusiasme untuk memastikan bahwa audiens tertarik dan siap bertindak.
4. Seimbang: Mengatur frekuensi komunikasi agar tidak terlalu jarang atau berlebihan.

5. Profesional: Menyampaikan pesan dengan bahasa yang sesuai dengan audiens.
6. Wording (Pemilihan Kata): Pemilihan kata yang tepat akan membuat komunikasi lebih jelas dan efektif.

D. MANAJEMEN RESIKO

Dukungan dari Stakeholder terkait sangatlah penting dalam pelaksanaan upaya penyusunan SK Tim Percepatan Eliminasi TBC dan Draft Perda TBC. Koordinasi yang bersifat continue dan berkesinambungan antara stakeholder sangatlah penting serta komunikasi yang efektif adalah hal utama keberhasilan dalam pelaksanaan aksi perubahan penulis. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.5. Matrix identifikasi resiko

NO	RISIKO	DAMPAK	KEMUNGKINAN	TINGKAT RESIKO	KATEGORI RISIKO
1	Keterlambatan dalam perencanaan dan persiapan	Keterlambatan Implementasi pembentukan SK Tim Eliminasi TBC.	40 – 69 %	4	Sedang
2	Kesalahan penulisan nama dan jabatan	Keterlambatan pembentukan SK Tim Eliminasi TBC	0 – 39 %	2	Rendah
3	Keterlambatan dalam penyiapan anggaran	Keterlambatan dalam pencapaian program TBC.	70 – 100 %	8	Tinggi
4	Kegagalan dalam pelaksanaan pelatihan	Keterlambatan dalam pencapaian program TBC	70 – 100 %	8	Tinggi

5	Keterlambatan dalam pengiriman dokumen	Keterlambatan penyelesaian laporan	40 – 69 %	4	Sedang
---	--	------------------------------------	-----------	---	--------

Kategori RESIKO

- Risiko Tinggi: 7-10
- Risiko Sedang: 4-6
- Risiko Rendah: 1-3

Kemungkinan

- Tinggi: 70-100%
- Sedang: 40-69%
- Rendah: 0-39%

Dampak

- Keterlambatan implementasi
- terlambatan dalam pencapaian program TBC
- Pengulangan pengetikan dokumen
- Keterlambatan dalam mencapai tujuan organisasi.
- Keterlambatan menerima dokumen
- Terhambatnya tujuan pembentukan Draft SK Tim

Dengan matriks identifikasi risiko, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dapat mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko yang terkait dengan implementasi pembentukan SK Tim Percepatan Eliminasi TBC serta mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja lebih baik menggunakan **antisipasi resiko**, seperti:

1. Keterlambatan dalam perencanaan dan persiapan:
 - Mengidentifikasi dan memprioritaskan kegiatan perencanaan dan persiapan.
 - Mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk perencanaan dan persiapan.
 - Mengadakan rapat dengan tim untuk membahas rencana implementasi.
 -
2. Keterlambatan Penyiapan anggaran

- Mengidentifikasi dan memprioritaskan narasumber yang kompeten
 - Mengalokasikan sumber daya yang cukup.
3. Kegagalan dalam pelaksanaan pelatihan
- Mengidentifikasi dan memprioritaskan tim dinas kesehatan yang handal
 - Mengalokasikan sumber daya yang cukup
4. Kegagalan dalam pemantauan dan evaluasi
- Mengidentifikasi dan memprioritaskan tim pemantauan dan evaluasi yang terpercaya.
 - Memastikan kegiatan telah di dokumentasi kan dan dilaporkan secara efektif
 - Mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pemantauan dan evaluasi.

Antisipasi risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang mungkin terjadi. Dengan melakukan antisipasi risiko, maka dapat mengurangi kemungkinan risiko terjadi dan menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi.

E. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM AKSI PERUBAHAN

Adopsi sebuah inovasi atau perubahan memiliki konsekuensi munculnya kebutuhan kompetensi baru yang harus dikuasai siapapun yang terdampak atas inovasi tersebut, terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.6 Strategi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan

Pihak Terdampak Aksi Perubahan	Kompetensi yang dibutuhkan	Cara pengembangan kompetensi (klasikal/ non klasikal)
Pejabat Dinas Kesehatan	Meningkatkan kemampuan dalam penanganan TBC	Bimtek klasikal
Staf administrasi Dinas Kesehatan	Dapat memahami penyusunan SK Tim Percepatan Eliminasi TBC	Bimtek klasikal

Lembaga Pemerintah	Mendukung kebijakan program Eliminasi TBC	In House Training
Lembaga non Pemerintah	Mendukung kebijakan program Eliminasi TBC	In House Training
Masyarakat	Menerapkan Prilaku Hidup Bersih untuk mengatasi penularan penyakit TBC	Tutorial

F. PEMETAAN SIKAP PERILAKU DAN RENSTRA PPD

A. HASIL PEMETAAN

1. Potensi Diri

Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki oleh seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Kesimpulan mengembangkan potensi diri adalah bahwa kita harus memperlihatkan kemampuan kita yang bisa kita miliki untuk menunjukkan kepada orang sekitar

2. Tujuan Pengembangan Potensi Diri

- a. Peserta mengenali sikap perilaku kepemimpinan yang dimiliki dan kebutuhan pengembangan yang dibutuhkan.
- b. Peserta mampu mengelola diri sendiri untuk selalu mengembangkan potensi yang dimiliki.

3. Proses Pembelajaran

1. Monitoring dan coaching.
2. Mentor bersama dengan peserta menilai sikap perilaku kepemimpinan dan menetapkan strategi pengembangan potensi diri, memonitor dan mendampingi pelaksanaan pengembangan potensi diri, serta melakukan penilaian atas perubahan/hasil pengembangan potensi diri.
3. Coach memastikan proses pengembangan potensi diri dilaksanakan dan melakukan pengecekan pelaksanaan pengembangan potensi diri.
4. Penilaian atas kegiatan pengembangan potensi diri dilakukan pada aspek sikap perilaku sebanyak 3% (2% dinilai mentor dan 1% dinilai

coach).

4. Peran Peserta, Mentor dan Coach

1. Peserta :

- a. Pemetaan diri
- b. Penetapan strategi PPD
- c. Pelaksanaan
- d. Paparan hasil (PPT: 1 hal untuk Pemetaan dan 1 hal untuk Pelaksanaan).
- e. Sebagai Mentee dan Coachee.

2. Mentor

- a. Pemetaan peserta
- b. Pembimbingan finalisasi pemetaan peserta dan penetapan strategi PPD
- c. Pembimbingan dan dukungan terhadap finalisasi PPD
- d. Melakukan penilaian atas kegiatan pemetaan dan pelaksanaan PPD

3. Coach

- a. Melakukan pengecekan proses dan progres pemetaan dan pelaksanaan PPD
- b. Melakukan penilaian atas kegiatan pemetaan dan pelaksanaan PPD.

8 (Delapan) Kompetensi Manajerial berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, adalah:

1. Integritas
2. Kerjasama
3. Komunikasi
4. Orientasi Hasil
5. Pelayanan Publik
6. Pengembangan diri dan orang lain
7. Mengelola perubahan
8. Pengambilan keputusan

Klasifikasi Kompetensi yang dibangun:

1. Berdasarkan pemahaman meta-kompetensi dalam 3 (tiga) klaster dasar,

yaitu:

- a. Managing self;
 - b. Managing other; dan
 - c. Managing organization.
2. Berdasarkan aspek-aspek penilaian sikap dan perilaku pada proses pelatihan.
 3. Mempertimbangkan kemudahan pengguna dalam melakukan asesmen serta memanfaatkan hasil pemetaan.

3 (tiga) Komponen Item Sikap dan Perilaku, yaitu:

1. Integritas:
 - a. Tanggung jawab
 - b. Komitmen
 - c. Kedisiplinan
 - d. Kejujuran
 - e. Konsistensi
 - f. Pengambilan keputusan/Ethical DM (pengambilan keputusan dalam kondisi dilematis.
2. Kerjasama:
 - a. Kerjasama internal
 - b. Kerjasama eksternal
 - c. Komunikasi
 - d. Fleksibilitas
 - e. Komitmen dalam tim
3. Mengelola Perubahan:
 - a. Pelayanan publik/orientasi pelayanan
 - b. Adaptabilitas
 - c. Pengembangan diri dan orang lain
 - d. Orientasi pada hasil
 - e. Inisiatif

Pelaku Pengukuran Mekanisme Skoring, Pengguna Hasil dan Pemanfaatan Hasil:

1. Kuesioner bersifat self assessment dan mentor assessment .
2. Skala penilaian 1 s.d. 10, diterapkan kategorisasi rentang :
 - a. 1 – 2 (sangat kurang)

- b. 3 – 4 (kurang)
 - c. 5 – 6 (cukup)
 - d. 7 – 8 (baik)
 - e. 9 – 10 (istimewa)
3. Pembobotan apabila dilakukan dengan pola multi-rater (peserta dan mentor) maka proporsinya adalah 30% untuk peserta (self) dan 70% untuk Mentor (dari skor maksimal).
 4. Dalam rangka efektivitas pemanfaatan hasil pemetaan, maka diperlukan adanya katalog atau matriks intervensi yang relevan dengan masing-masing sub-komponen sikap perilaku.

Tabel 1.7 Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Rekomendasi Pengembangan Potensi Diri	
Istimewa	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi.
Baik	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan administrator.
Cukup	Memperhatikan nilai pada sub kamponen pada Formulir Peserta atau Mentor den Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bertuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan administrator.

Kurang	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan Administrator.
Sangat kurang	

B. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Tabel 1.7. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

No	Komponen	Sub Komponen	Rencana Pengembangan Kompetensi Diri	Kegiatan/Tahapan Aksi Perubahan	Waktu Pelaksanaan (Rencana / Realisasi)	Hasil
1	Integritas	Kejujuran	Melatih diri dalam Menyampaikan argumentasi sesuai kondisi riil, dengan melibatkan data dan fakta yang terdokumentasi oleh diri sendiri dan pihak lain (untuk mengurangi informasi tanpa dasar fakta)	Informasi yang akurat pada saat pelaksanaan Aksi Perubahan dengan bukti-bukti dukung	Minggu ke 3, 4 April dan minggu 1 dan 2 Mei / Dokumentasi	
2	Kerja	Kerja	Mempelajari pola kerja	Koordinasi dan	Minggu	

	Sama	sama Inter nal	tim yang efektif sebagai landasan dalam membangun serta memupuk kemampuan berkerjasama dengan berbagai pihak (yang memiliki berbagai latar belakang budaya atau kepentingan)	komunikasi secara efektif bersama tim dalam pelaksanaan aksi perubahan	pertama April/ Dokumentasi	
--	------	----------------------	--	--	----------------------------------	--

Keterangan:

1. Diisi dengan Nomor urut sub komponen yang akan dilakukan pengembangan diri.
2. Diisi dengan komponen / sub komponen sesuai dengan hasil dialog kinerja yang diperlukan untuk pengembangan diri.
3. Diisi dengan mengcopy panduan intervensi sesuai dengan sub komponen yang diperlukan untuk pengembangan diri.
4. Diisi dengan aktivitas perilaku yang akan dilakukan sesuai dengan panduan intervensi dalam kegiatan yang terukur dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan.
5. Diisi dengan kegiatan/ tahapan kegiatan yang disucun pada proyek perubahan yang relevan sebagai wadah untuk menunjukkan aktivitas perilaku atau kegiatan pengembangan potensi diri.
6. Diisi dengan rencana waktu pelaksanaan yang dapat disesuaikan dengan pelaksanaan implementasi aksi perubahan.
7. Diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan.

3	Men gelol a peru baha n	Adap tabilit as	Mempelajari berbagai referensi mengenai pola komunikasi adaptif atau situasional, kepemimpinan transformasional dalam rangka memperkaya strategi membangun harmonisasi berbagai latar belakang individu	Mendengarkan masukan-masukan dalam pelaksanaan aksi perubahan	Minggu pertama April/ Dokumentasi Resume/masukan	
---	--	-----------------------	---	---	--	--

FORMULIR PESERTA

Nama : Ira Primadesa Ogatiah,S.Si,M.Kes
NIP : 197412182003122004
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Instansi : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Program : Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2025

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1 Memastikan anggota/anak buah yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma dan aturan organisasi dalam segala situasi dan kondisi	9
	2 Menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas yang diembannya.	9
	3 Memastikan anggota/anak buah yang dipimpin memiliki kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mereka emban sesuai tenggat waktu yang ada kerja yang berlaku dalam organisasi.	8
	4 Memastikan anggota/anak buah yang dipimpin memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada orang lain/pihak lain sesuai etika organisasi	7.5
	5 Memberikan apresiasi dan teguran kepada anggota/anak buah yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi	8
	6 Memberikan argumentasi dengan disertai pemahamannya atas ketentuan yang berlaku di organisasi termasuk konsekuensinya, dalam memastikan anggota/anak buah yang dipimpin menegakkan ketentuan lain	8
	JUMLAH	8.25

KERJASAMA	7	Bekerjasama dalam tim dalam memecahkan masalah dan selalu memberikan Solusi.	7.5
	8	Membangun aliansi dengan pemangku kepentingan untuk pencapaian target kerja.	8
	9	Membangun komunikasi dengan internal dan eksternal dalam Upaya peningkatan kinerja organisasi	8
	10	Saat melaksanakan tugas berusaha mencari Solusi dengan pemecahan masalah secara fleksibel dan tidak terburu-buru	8
	11	Mengutamakan pengambilan Keputusan berdasarkan Keputusan Bersama dari anggota tim	8
		JUMLAH	7.90
MENGELOLA PERUBAHAN	12	Memberikan motivasi dan contoh dalam memberikan pelayanan dan orientasi pelayanan publik yang efektif dan efisien.	8
	13	Melakukan adaptasi setiap perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerja	7.5
	14	Selalu bekerja dengan semangat dan meningkatkan kualitas bekerja dengan mengikuti pelatihan dan juga mendorong anggota tim bekerja dan meningkatkan profesionalisme kerja	8
	15	Bekerja untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan meningkatkan kinerja organisasi	8
	16	Memberikan inisiatif dalam memberikan Solusi efektif dari permasalahan yang ada	8
			JUMLAH

**FORMULIR
MENTOR**

Nama Peserta	: Ira Primadesa Ogatiyah,S.Si,M.Kes	Nama Mentor	: Fery Fahrizal, SKM, MKM 19680219
NIP	: 197412182003122004	NIP:	: 199003 1001
Jabatan	: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi	Jabatan	: Sekretaris Dinas
Instansi	: Sumatera Selatan	Instansi	: Kesehatan Prov.Sumsel
Program	: Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2025		

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10	
INTEGRITAS	1	Memastikan anggota/anak buah yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma dan aturan organisasi dalam segala situasi dan kondisi	9
	2	Menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas yang diembannya.	9
	3	Memastikan anggota/anak buah yang dipimpin memiliki kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mereka emban sesuai tenggat waktu yang ada kerja yang berlaku dalam organisasi.	8
	4	Memastikan anggota/anak buah yang dipimpin memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada orang lain/pihak lain sesuai etika organisasi	8
	5	Memberikan apresiasi dan teguran kepada anggota/anak buah yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi	8

	6	Memberikan argumentasi dengan disertai pemahamannya atas ketentuan yang berlaku di organisasi termasuk konsekuensinya, dalam memastikan anggota/anak buah yang dipimpin menegakkan ketentuan lain	8
		JUMLAH	8.333333333
KERJASAMA	7	Bekerjasama dalam tim dalam memecahkan masalah dan selalu memberikan Solusi.	8
	8	Membangun aliansi dengan pemangku kepentingan untuk pencapaian target kerja.	8
	9	Membangun komunikasi dengan internal dan eksternal dalam Upaya peningkatan kinerja organisasi	8
	10	Saat melaksanakan tugas berusaha mencari Solusi dengan pemecahan masalah secara fleksibel dan tidak terburu-buru	8
	11	Mengutamakan pengambilan Keputusan berdasarkan Keputusan Bersama dari anggota tim	8
		JUMLAH	8.00
MENGELOLA PERUBAHAN	12	Memberikan motivasi dan contoh dalam memberikan pelayanan dan orientasi pelayanan pelayanan publik yang efektif dan efisien.	8
	13	Melakukan adaptasi setiap perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerja	8
	14	Selalu bekerja dengan semangat dan meningkatkan kualitas bekerja dengan mengikuti pelatihan dan juga mendorong anggota tim bekerja dan meningkatkan profesionalisme kerja	8
	15	Bekerja untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan meningkatkan kinerja organisasi	8
	16	Memberikan inisiatif dalam memberikan Solusi efektif dari permasalahan yang ada	8
		JUMLAH	8.00

REKAP NILAI PESERTA

Nama : Ira Primadesa Ogatiah,S.Si,M.Kes
NIP : 197412182003122004
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Instansi : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Pelatihan Kepemimpinan
 Administrator (PKA) **Program** : Angkatan I Tahun 2025

Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	Istimewa
	Komitmen	9	Istimewa
	Kedisiplinan	8	Baik
	Kejujuran	7.5	Baik
	Konsistensi	8	Baik
	Pengambilan Keputusan	8	Baik
	Rata-Rata	8.25	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	7.5	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	Baik
	Komunikasi	8	Baik
	Fleksibilitas	8	Baik
	Komitmen dalam Tim	9	Istimewa

	Rata-Rata	8.10	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	9	Istimewa
	Adaptabilitas	7.5	Baik
	Pengembangan diri dan orang lain	8	Baik
	Orientasi pada hasil	8	Baik
	Inisiatif	8	Baik
	Rata-Rata	8.10	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.15	Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

REKAP NILAI MENTOR

Nama Peserta : Ira Primadesa Ogatiyah,S.Si,M.Kes **Nama Mentor** : Fery Fahrizal, SKM, MKM
NIP : 197412182003122004 **NIP** : 19680219 199003 1001
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit **Jabatan** : Sekretaris
Instansi : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan **Instansi** : Dinas Kesehatan Prov.Sumsel
Program : Administrator
(PKA) Angkatan I Tahun 2025

Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas Kerjasama Mengelola Perubahan	Tanggung jawab	9	Istimewa
	Komitmen	9	Istimewa
	Kedisiplinan	8	Baik
	Kejujuran	8	Baik
	Konsistensi	8	Baik
	Pengambilan Keputusan Dilematis	8	Baik
	Rata-Rata	7.14	Baik
	Kerjasama Internal	8	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	Baik
	Komunikasi	8	Baik
	Fleksibilitas	8	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	Baik
	Rata-Rata	8.00	Baik
	Orientasi Pelayanan	8	Baik
	Adaptabilitas	8	Baik
	Pengembangan diri dan orang lain	8	Baik
	Orientasi pada hasil	8	Baik
	Inisiatif	8	Baik
	Rata-Rata	8.00	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		7.71	Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

<p>Nama : Ira Primadesa Ogatiyah,S.Si,M.Kes</p> <p>NIP : 197412182003122004</p> <p>Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</p> <p>Instansi : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Program : Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2025</p>	<p>Nama : Fery Fahrizal, SKM, Mentor MKM</p> <p>NIP : 19680219 199003 1001</p> <p>Jabatan : Sekretaris</p> <p>Instansi : Dinas Kesehatan Prov.Sumsel</p>
---	---

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	9	9.00	Istimewa
	Komitmen	9	9	9.00	Istimewa
	Kedisiplinan	8	8	8.00	Baik
	Kejujuran	7.5	8	8.00	Baik
	Konsistensi	8	8	8.00	Baik
	Pengambilan Keputusan	8	8	8.00	Baik
	Rata-Rata	8.25	8.33	8.31	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	7.5	8	7.85	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	8	8.00	Baik
	Komunikasi	8	8	8.00	Baik
	Fleksibilitas	8	8	8.00	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	8	8.00	Baik
	Rata-Rata	7.90	8.00	7.97	Baik
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	8	8	8.00	Baik
	Adaptabilitas	7.5	8	8.00	Baik

	Pengembangan orang lain	8	8	8.00	Baik
	Orientasi pada hasil	8	8	8.00	Baik
	Inisiatif	8	8	8.00	Baik
	Rata-Rata	7.90	8.00	7.97	Baik
	Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :	8.02	8.11	8.08	Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

<p>Nama Peserta : Ira Primadesa Ogatiyah,S.Si,M.Kes</p> <p>NIP : 197412182003122004</p> <p>Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</p> <p>Instansi : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Program : Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2025</p>	<p>Nama : Fery Fahrizal, SKM,</p> <p>Mentor : MKM</p> <p>NIP : 19680219 199003 1001</p> <p>Jabatan : Sekretaris</p> <p>Instansi : Dinas Kesehatan Prov.Sumsel</p>
---	--

Nilai Komponen					
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	8.25	7.90	7.90	8.02	Baik
Mentor	8.33	8.00	8.00	8.11	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8.31	7.97	8.00	8.08	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan

Kualifikasi

9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
8.08
Kualifikasi:
Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:		
Istimewa	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Sangat Kurang	:	

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan di dalam sebuah organisasi. Penyusunan Tim Percepatan Eliminasi TBC yang efektif memerlukan integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penanggulangan TBC dikelola dengan baik dan transparan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa cara efektif untuk membangun integritas dan akuntabilitas kinerja Organisasi:

1. Mengidentifikasi dan Menjaga Nilai-Nilai Integritas

Integritas adalah kejujuran yang diimplementasikan secara nyata dalam tindakan sehari-hari. Pemimpin harus menjadi contoh dan teladan dengan menjalankan nilai-nilai integritas seperti jujur, konsisten, dan responsif terhadap layanan masyarakat.

2. Membangun Jejaring dan Kolaborasi

Pemimpin harus membangun jejaring yang kuat dengan anggota tim. Komunikasi efektif dan empati sangat penting untuk memahami kebutuhan dan kekuatan setiap individu.

3. Mengembangkan Kompetensi

Proses pembangunan integritas dan akuntabilitas kinerja dapat dilakukan dengan tiga pendekatan: karakter, kompetensi, dan literasi. Meningkatkan kinerja tim dan menjaga moralitas tim adalah penting.

4. Mengidentifikasi dan Menyoroti Bawahan

Pemimpin harus mengidentifikasi dan menyoroti bawahan untuk kaitan antara individu, tim, dan kinerja organisasi. Berbagi informasi mengenai standar etika organisasi dan menjadi model yang profesional.

5. Mengukur dan Meningkatkan Kinerja

Pemimpin bertanggung jawab untuk mengelola kinerja timnya. Membangun akuntabilitas kinerja melalui proses persiapan, implementasi, dan monitoring evaluasi dapat meningkatkan kinerja organisasi.

6. Mengembangkan Potensi Diri dan Tim

Pemimpin harus mampu mengembangkan pribadi dan profesional anggota tim. Ini

melibatkan pelatihan, coaching, dan konsultasi untuk meningkatkan kinerja dan integritas.

Dengan demikian, membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi melibatkan strategi yang komprehensif, termasuk komunikasi efektif, pengembangan kompetensi, identifikasi dan peningkatan kinerja, serta pengembangan potensi diri dan tim. Membangun integritas dan akuntabilitas dalam penanggulangan TBC memerlukan pendekatan sistematis yang melibatkan keterlibatan pimpinan, penyusunan laporan kinerja yang transparan, peningkatan kapasitas SDM, implementasi sistem informasi, serta penerapan reward and punishment. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penanggulangan TBC dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab kepada publik.

B. Pengelolaan Budaya Kerja

Pengelolaan budaya kerja adalah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Pengelolaan budaya kerja dalam bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sangat penting untuk memastikan bahwa semua proses penanggulangan TBC dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Budaya kerja yang kuat dapat meningkatkan kinerja organisasi dan memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa langkah penting dalam pengelolaan budaya kerja:

a. Mengidentifikasi Budaya Kerja

Budaya kerja adalah nilai, karakteristik, dan atribut yang dimiliki suatu organisasi dan dijalankan oleh setiap pegawai. Ini mencakup praktik kepemimpinan, perilaku pegawai, fasilitas tempat kerja, dan kebijakan organisasi.

b. Membangun Budaya Kerja yang Positif

Transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan motivasi pegawai. Organisasi harus jujur tentang hasil dan rencana bisnisnya. Mendorong kerjasama antar pegawai dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kolaborasi, yang mengarah pada peningkatan kepuasan kerja dan produktivitas. Memberikan wewenang kepada pegawai dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas mereka.

c. Mengembangkan Potensi Pegawai

Meningkatkan kinerja tim dan menjaga moralitas/spiritualitas tim adalah penting. Pemimpin harus menjadi contoh dan teladan dengan menjalankan nilai-nilai integritas. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan, coaching, dan konsultasi dapat meningkatkan kinerja dan integritas.

d. Mengukur dan Meningkatkan Kinerja

Pemimpin bertanggung jawab untuk mengelola kinerja timnya. Membangun akuntabilitas kinerja melalui proses persiapan, implementasi, dan monitoring evaluasi dapat meningkatkan kinerja organisasi.

e. Mengembangkan Budaya Kerja yang Sesuai

Budaya Kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah Ber AKHLAK, yaitu Budaya ASN Berakhlak adalah sebuah sistem nilai dan perilaku yang diintegrasikan dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Berakhlak merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang setiap nilai dasar ini:

1) Berorientasi Pelayanan

Memahami dan memenuhi kebutuhan OPD, Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta dapat melakukan perbaikan tiada henti.

2) Akuntabel

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin serta selalu berintegritas tinggi dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3) Kompeten

Mampu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah.

4) Harmonis

Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya

5) Loyal

Memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945, serta pemerintahan yang sah.

6) Adaptif

Mampu untuk cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.

7) Kolaboratif

Bekerja sama dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan yang lebih besar.

Implementasi nilai-nilai ASN Berakhlak bertujuan untuk membangun budaya kerja yang positif dan sehat, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan demikian, ASN yang memahami dan menerapkan nilai-nilai ini dapat meningkatkan kepercayaan, saling menghormati, dan integritas di antara pegawai dan pemimpin. Hal ini juga diharapkan akan mempengaruhi cara organisasi memberikan layanan publik yang lebih baik dan lebih profesional.

Dengan demikian, budaya ASN Berakhlak menjadi pondasi budaya kerja profesional yang diharapkan meningkatkan kinerja ASN secara berkelanjutan dan memperbaiki citra publik terhadap ASN.

Membangun budaya kerja yang kuat di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memerlukan komitmen dari seluruh elemen organisasi, mulai dari pimpinan hingga staf. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan inspiratif, pelatihan berkelanjutan, sistem informasi manajemen yang efektif, pembentukan tim solid, budaya evaluasi, serta komitmen terhadap etika, organisasi dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam penanggulangan TBC secara signifikan.

C. MEMBANGUN JEJARING DAN KOLABORASI

Tehnologi Informasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam era digital seperti sekarang, pemerintah daerah perlu memanfaatkan tehnologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan. Salah satu contoh penggunaan tehnologi informasi dalam pelayanan kesehatan adalah dengan penggunaan sistem informasi pemerintah daerah. Pengelolaan pelayanan dengan memanfaatkan tehnologi informasi dapat mempermudah dan meningkatkan efektifitas pelayanan yang diberikan ke OPD dan masyarakat. Demikian juga Pengelolaan budaya kerja dalam bidang kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa semua proses pelayanan kesehatan dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Budaya kerja yang kuat dapat meningkatkan kinerja organisasi dan memfasilitasi pencapaian tujuan pelayanan kesehatan.

Berikut ini adalah beberapa aspek pengelolaan pelayanan yang dapat dimanfaatkan dengan teknologi informasi langkah penting dalam pengelolaan budaya kerja:

1. Menjadwalkan Konsultasi

Memfaatkan sistem konsultasi dan menjadwalkan secara online untuk memudahkan OPD dan masyarakat melakukan konsultasi atau mendapatkan layanan tanpa harus datang langsung ketempat. Sistem ini dapat mengurangi waktu dan mudah mempermudah mengatur mereka sesuai dengan kebutuhan.

2. Mengidentifikasi Budaya Kerja

Budaya kerja adalah nilai, karakteristik, dan atribut yang dimiliki suatu organisasi dan dijalankan oleh setiap pegawai. Ini mencakup praktik kepemimpinan, perilaku pegawai, fasilitas tempat kerja, dan kebijakan organisasi.

3. Membangun Budaya Kerja yang Positif

Transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan motivasi pegawai. Organisasi harus jujur tentang hasil dan rencana bisnisnya. Mendorong kerjasama antar pegawai dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kolaborasi, yang mengarah pada peningkatan kepuasan kerja dan produktivitas. Memberikan wewenang kepada pegawai dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas mereka.

4. Mengembangkan Potensi Pegawai

Meningkatkan kinerja tim dan menjaga moralitas/spiritualitas tim adalah penting. Pemimpin harus menjadi contoh dan teladan dengan menjalankan nilai-nilai integritas. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan, coaching, dan konsultasi dapat meningkatkan kinerja dan integritas.

5. Mengukur dan Meningkatkan Kinerja

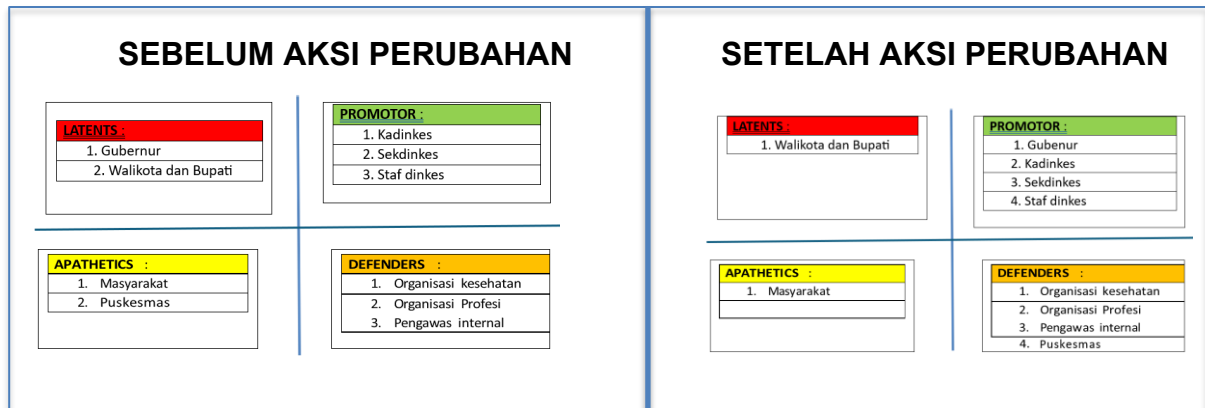
Pemimpin bertanggung jawab untuk mengelola kinerja timnya. Membangun akuntabilitas kinerja melalui proses persiapan, implementasi, dan monitoring evaluasi dapat meningkatkan kinerja organisasi.

6. Mengembangkan Budaya Kerja yang Sesuai

Budaya Kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah Ber-AKHLAK, yaitu Budaya ASN Berakhlak adalah sebuah sistem nilai dan perilaku yang diintegrasikan dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Berakhlak

merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Gambar 2.1. Peta Stakeholder Sebelum dan Setelah Aksi Perubahan



D. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dalam rangka menjalankan gagasan aksi perubahan sumber daya manusia yang terlibat didalamnya memerlukan pengembangan-pengembangan kompetensi, adapun pengembangan yang akan dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi dan Edukasi terkait penyusunan Tim Koordinasi Percepatan Eliminasi TBC. Sosialisasi menjadi kunci utama dalam implementasi PP RI nomor 67 tahun 2021. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami isi dan mekanisme penanggulangan TBC dengan baik. Sosialisasi dan edukasi penanggulangan TBC bertujuan untuk:

Bagi masyarakat :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan pengobatan TBC
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya eliminasi TBC
- c. Mengurangi biaya pengobatan dengan mengurangi jumlah kasus TBC
- d. Meningkatkan produktivitas dengan tubuh yang sehat tanpa TBC

Bagi organisasi :

- a. Tersusunya tim percepatan dan rancangan Perda eliminasi TBC yang berkualitas di Dinas Kesehatan.
- b. Terwujudnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya penanggulangan TBC melalui Perda.

Bagi individu :

- a. Mengurangi resiko penularan dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi
- b. Meningkatkan kualitas hidup dengan pengetahuan tentang penyakit TBC

Sasaran sosialisasi dan edukasi penanggulangan TBC:

- a. Masyarakat umum;
- b. Puskesmas
- c. Perangkat daerah di tingkat pusat dan daerah;
- d. Instansi pemerintah terkait.

Metode Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan TBC:

- a. Seminar dan workshop
- b. Publikasi melalui media massa;
- c. Kampanye di media sosial;
- d. Penyediaan layanan informasi dan konsultasi.

2. Bimbingan Teknis, Pelatihan dan in House Training SDM

Bimbingan teknis atau dikenal juga dengan Bimtek adalah proses pemberian arahan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas seseorang atau kelompok dalam suatu bidang tertentu.

Tujuan:

- a. Peningkatan Kualitas SDM, untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada individu dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam proses penanggulangan TBC
- b. Kerja Sama yang Lebih Baik, individu dapat memiliki pemahaman yang seragam tentang prosedur, kebijakan, dan tujuan tertentu, sehingga memperkuat koordinasi dan kolaborasi di antara mereka.
- c. Meningkatkan Efektivitas Kerja, mencakup pengembangan sistem kerja yang lebih efisien, implementasi praktik terbaik di lapangan, dan peningkatan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal.
- d. Memiliki Kompetensi untuk Mengoptimalkan Tugas dan Tanggung Jawab, untuk memberikan dukungan yang spesifik kepada individu dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan

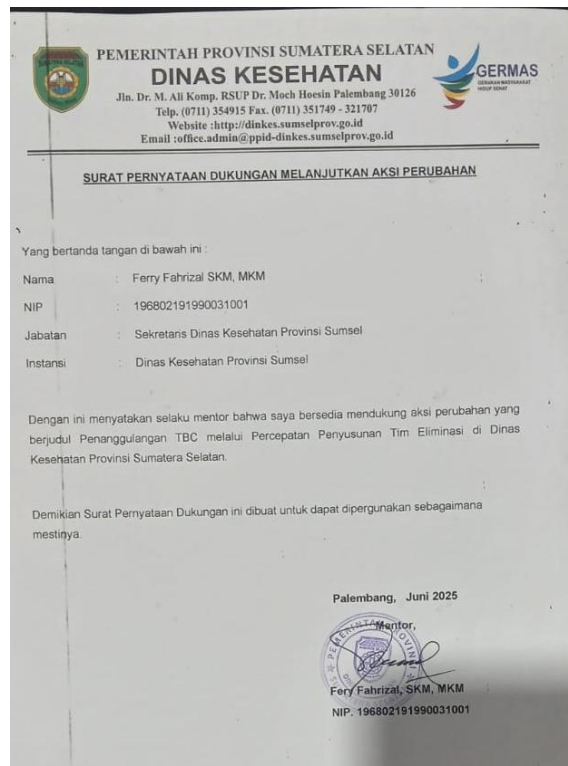
pekerjaan dengan baik.

- e. Pengembangan Karier, membantu individu untuk mempersiapkan diri secara efektif untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab di masa depan.

3. Melakukan Rapat Koordinasi

Tujuan:

- a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.
- b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan inter-dependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif antisipatif dikalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.



BAB III
DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. CAPAIAN DAN BUKTI PERBAIKAN KINERJA ORGANISASI

Tabel 3.1. Milestone Jangka Pendek

No.	Tahapan dan Uraian Kegiatan	Waktu	Output	Bukti
A.	Jangka Pendek (2 Bulan)			
1.	Melapor kepada mentor	05 Mei 2025	· Laporan hasil koordinasi Surat dukungan · Foto	· terlampir
2.	Rapat pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Eliminasi TBC	06 Mei 2025	· Surat undangan Notulen Daftar hadir Foto	· terlampir
3.	Melakukan rapat bersama stakeholder tentang komitmen	09 Mei 2025	· Surat undangan Daftar hadir Notulen Foto	· terlampir
4.	a. Melakukan sosialisasi implementasi terkait TBC RO di Puskesmas b. Menyebarkan informasi terkait Aksi Perubahan	14 Mei 2025	· Surat undangan Daftar hadir Notulen · Video	· terlampir
5.	Menyusun draft SK Gubernur tentang Tim Koordinasi Percepatan Eliminasi TBC	16 s/d 23 Mei 2025	· Dokumen Draft SK	· terlampir
6.	Meningkatkan Kompetensi Tim Koordinasi Percepatan Eliminasi TBC melalui Pelatihan Penyusunan Kebijakan Percepatan Eliminasi TBC	21 - 22 Mei 2025	· Surat Undangan Daftar hadir Notulen · Sertifikat	· terlampir
7.	Melakukan sosialisasi melalui workshop implementasi pengobatan TBC RO	26 Mei 2025	· Surat undangan Daftar hadir Notulen	· terlampir
8.	Menyebarkan informasi tentang rekrutmen tenaga GF yang membantu penanggulangan TBC melalui media sosial	16 s/d 25 Juni 2025	· IG Dinkes Provinsi Sumatera Selatan	· terlampir

Tabel 3.2. Milestone Jangka Menengah

No.	Tahapan dan Uraian Kegiatan	Waktu	Output
B	Jangka Menengah (6 bulan)		
1.	Menyebarkan dan memberikan informasi tentang SK Gubernur Nomor 311/KPTS/DINKES/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 Mei 2025	Jumat 20 Juni 2025	· Dokumen SK · Foto
2.	Melaksanakan rapat bulanan terkait realisasi tindak lanjut SK Tim Koordinasi Percepatan Eliminasi TBC	Minggu ke-2 Juli 2025	· Surat undangan Daftar hadir Notulen
3.	Pembuatan SK Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah TBC Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	Minggu ke-4 Juli 2024	· Draft SK Kepala Dinas Kesehatan
4.	Melakukan Pemantauan dan pendataan lapangan terhadap eviden SK Gubernur Nomor 311/KPTS/DINKES/2025	Minggu ke- 1,2,3,4 Agustus s.d Minggu ke-1,2,3,4 September 2025	· Surat Tugas · Laporan Perjalanan Dinas
5.	Rapat koordinasi hasil pemantauan dan pendataan	Minggu ke-1 Oktober 2025	· Surat undangan Daftar hadir Notulen
6.	Laporan kepada mentor hasil pemantauan dan pendataan	Minggu ke-2 Oktober 2025	· Laporan hasil koordinasi · Foto
7.	Rapat terkait pembentukan Tim RAD TBC tingkat Provinsi	Minggu ke-3 Oktober 2025	· Surat undangan Daftar hadir Notulen
8.	Pembuatan SK Tim RAD TBC tingkat Provinsi	Minggu ke-4 Oktober 2025	· SK Kepala Daerah
9.	Rapat Koordinasi terkait peran dan tugas Tim RAD TBC	Minggu ke-1 November 2025	· Surat undangan Daftar hadir Notulen
10	Laporan kepada mentor hasil aksi jangka menengah	Minggu ke-1 Desember 2025	· Dokumen laporan

Tabel 3.3. Milestone Jangka Panjang

No.	Tahapan dan Uraian Kegiatan	Waktu	Output
C	Jangka Panjang (12 bulan)		
1.	Mengusulkan anggaran kegiatan penyusunan regulasi Perda TBC	November 2025	· Dokumen usulan anggaran · Foto
2.	FGD dengan stakeholder terkait progres penyelenggaraan, realisasi dan kendala eliminasi TBC	Maret 2026	· Surat undangan · Daftar hadir · Notulen · Foto

3.	Sosialisasi Perda TBC	Oktober 2026	<ul style="list-style-type: none"> · Surat undangan · Daftar hadir · Notulen · Foto
4.	Monitoring dan Evaluasi	November 2026 sd April 2027	<ul style="list-style-type: none"> · Surat Tugas · Foto · Data hasil monev
5.	Laporan kepada mentor hasil aksi jangka panjang	Mei 2027	<ul style="list-style-type: none"> · Dokumen Laporan

DEKSRIPI KEGIATAN AKSI PERUBAHAN JANGKA PENDEK (2 BULAN)

1) TAHAP PERSIAPAN

1. Melapor kepada mentor

Menjelaskan dan meminta arahan serta dukungan tentang aksi perubahan. Melakukan pelaporan kepada mentor dan menjelaskan aksi perubahan tentang “Penanggulangan TBC melalui percepatan penyusunan Tim Eliminasi di Provinsi Sumatera Selatan” tanggal 05 Mei 2025 di ruang kerja Sekretaris Dinas Kesehatan, sebagai mentor sangat mendukung dan mengapresiasi penuh dalam aksi perubahan untuk eliminasi TBC.



2. Melaksanakan rapat pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Eliminasi TBC

Rapat tim dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 di ruang rapat bidang P2P Dinas Kesehatan dengan menjelaskan tugas dan fungsi tim serta menyatukan persamaan persepsi dalam eliminasi TBC melalui pembentukan tim koordinasi percepatan eliminasi TBC, sehingga target eliminasi tahun 2030 tercapai.



2) TAHAP PELAKSANAAN

1. Melakukan rapat bersama stakeholder tentang komitmen

Kegiatan ini dilaksanakan hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 di ruang rapat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan anggota rapat dari stakeholder yang terkait pada pelaksanaan Eliminasi TBC antara lain dari Puskesmas, Instansi Pendidikan Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Hasil kesepakatan rapat seluruh stakeholder dapat membantu dalam mewujudkan eliminasi TBC sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.



2. a. Melakukan sosialisasi implementasi terkait TBC RO di Puskesmas

b. Menyebarkan informasi terkait Aksi Perubahan

Dua kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 di hotel Luminor Palembang. Hasil yang diharapkan adalah seluruh penanggung jawab program TBC di Puskesmas dapat memahami dan mengimplementasikan kegiatan TBC RO sehingga kasus kematian dapat menurun. Untuk masyarakat di Provinsi Sumatera

Selatan mengetahui bahwa dengan adanya aksi perubahan yang saya laksanakan akan membantu mewujudkan eliminasi TBC di tahun 2030.



3. Menyusun draft SK Gubernur tentang Tim Koordinasi Percepatan Eliminasi TBC

Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 16 sampai dengan 23 Mei 2025 oleh seksi pencegahan penyakit menular dan seksi perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Dengan hasil tersusunnya draft SK Gubernur.



4. Meningkatkan Kompetensi Tim Koordinasi Percepatan Eliminasi TBC melalui Pelatihan Penyusunan Kebijakan Percepatan Eliminasi TBC

Tim mempunyai peranan yang penting dalam terlaksananya pelayanan kesehatan yang optimal dan memiliki kemampuan untuk membuat draft rencana aksi daerah TBC sebagai dasar pembuatan Perda TBC. Untuk meningkatkan kompetensi Tim dilakukan pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 22 Mei 2025 di hotel Ibis Styles Solo dengan narasumber yang berkompeten dibidangnya. Diharapkan dengan pelatihan ini rencana aksi daerah terbentuk.



5. Melakukan sosialisasi melalui workshop implementasi pengobatan TBC RO Kegiatan ini dilaksanakan hari Senin tanggal 26 Mei 2025 di hotel Parkside Palembang dengan mengundang stake holder pengobatan TBC RO, dengan hasil pasien TBC RO dapat ditemukan kasusnya dan diobati sampai sembuh sehingga tidak menularkan ke orang lain.



6. Menyebarkan informasi tentang rekrutmen tenaga GF melalui media sosial Penyebaran informasi melalui media sosial dan elektronik adalah langkah yang efisien baik dari biaya, waktu dan sasaran serta manfaatnya. Untuk media social seperti Facebook, Instagram, dan Youtube; media elektronik seperti iklan di radio maupun poadcast. Untuk aksi perubahan ini sosialisasi menggunakan Instagram Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dari tanggal 16 sampai dengan 26 Juni 2025. Diharapkan dengan rekrutmen tenaga GF dapat membantu penanggulangan TBC di Provinsi Sumatera Selatan.

7. Menyebarkan dan memberikan informasi tentang SK Gubernur Nomor 311/KPTS/DINKES/2025

SK Gubernur tersebut tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 Mei 2025. Menggunakan media elektronik berupa podcast di Radio Republik Indonesia (RRI) Palembang yang dilaksanakan hari Jumat tanggal 20 Juni 2025. Diharapkan seluruh masyarakat mengetahui tentang SK Gubernur tersebut dan membantu tercapainya eliminasi TBC di Provinsi Sumatera Selatan.



B. MANFAAT AKSI PERUBAHAN

- Manfaat aksi perubahan jangka pendek tersampainya informasi dan pemahaman untuk tercapainya eliminasi TBC di Provinsi Sumatera Selatan dengan terbentuknya SK Gubernur Nomor 311/KPTS/DINKES/2025.
- Manfaat aksi perubahan jangka menengah Meningkatnya kemampuan kompetensi Tim untuk membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC sebagai dasar pembentukan Perda TBC di Provinsi Sumatera Selatan.
- Manfaat aksi perubahan jangka panjang adalah terbentuknya Perda TBC sehingga dapat membantu penanggulangan TBC dan mewujudkan eliminasi TBC di tahun 2030.

Efisiensi Biaya yang dipangkas setelah aksi perubahan untuk 1 (satu) tahun
Perjalanan Dinas 1 orang, minimal sebesar

Rp. 380.000,- x 17 kabupaten/kota = Rp. 6.460.000,-

Efisiensi Biaya Perjadin yang dipangkas setelah aksi perubahan untuk 1 (satu) tahun ,dengan 3 dokumen (SK Gubernur, RAD, Perda) sebesar

Rp. 6.460.000,- x 3 dokumen = Rp. 19.380.000,-

Untuk rincian manfaat aksi perubahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Manfaat Aksi Perubahan

No	Aksi Perubahan	Nilai Tambah	Konversi Nilai Rupiah
1.	Terbentuknya SK Gubernur	o Efisiensi waktu pelayanan	o Waktu pelayanan menjadi 22 hari
		o Persyaratan:	o Persyaratan:
		1. SDM	1. SDM berkurang 3 org x Rp. 500.000 = Rp. 1.500.000,-
		2. ATK	2. Kertas 2 Rim x Rp.63.000. = Rp. 126.000,- Map kertas 5 x Rp.1.000 = Rp. 5.000
		3. SPPD Dalam Daerah dan Luar Daerah	3. 10 org x Rp.140.000 = Rp. 1.400.000,- 5 orang x Rp. 380.000 = Rp. 1.900.000
		4. Nilai Dokumen	4. Nilai Dokumen = (Rp. 1.500.000 + Rp. 126.000, + Rp. 5.000 + Rp. 1.400.000 + Rp. 1.900.000) x 5 layanan di PKM = Rp. Rp. 24.655.000,-
5. Efisiensi Biaya yang dikeluarkan dipangkas	5. Efisiensi biaya dipangkas Rp 24.655.000 + Rp. 937.000 = Rp. 26.529.500,-		
2.	Inovasi penyebaran produk (elektronik)	o Efisiensi percetakan : biaya berkurang	Cetak dokumen 50 lembar x Rp. 250 x 15 produk x 5 pemohon = Rp. 937.500,-
		o Efisiensi Proses	
		o Efisiensi dari masyarakat	o Biaya transportasi Rp. 30.000 x 5 produk = Rp. 150.000 o Biaya cetak dokumen 20 lembar x 15 dokumen x Rp. 250 = 75.000
3.	Inovasi Program	o Jumlah 3 dokumen (SK Gubernur, RAD, Perda TBC)	= 6.460.000 perjadin 1 thn x 3 dokumen = Rp. 19.380.000

C. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI AKSI PERUBAHAN

Tabel 3.5. Pengembangan Kompetensi Aksi Perubahan

No	Pihak Terdampak Aksi Perubahan	Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi
1.	Masyarakat	Memahami tentang proses, persyaratan dan tahapan mendapatkan pelayanan pengobatan TBC	Sosialisasi tentang penyelenggaraan pelayanan pengobatan TBC melalui Puskesmas
2.	Puskesmas	Memahami tentang proses, persyaratan dan tahapan dalam pengobatann TBC	Pendampingan dan sosialisasi
3.	Tim koordinasi Eliminasi TBC	Memahami prosedur, persyaratan pada tahapan pembuatan draft dokumen SK Gubernur, RAD dan Perda TBC	Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sebagai Tim Koordinasi Eliminasi TBC
4.	Pemerintah Kabupaten/Kota	Mendapatkan informasi tentang SK Gubernur nomor 311/KPTS/DINKES/2025	Sosialisasi

BUKTI KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI AKSI PERUBAHAN

- a. Kegiatan sosialisasi kepada Masyarakat

Dokumen Video Kegiatan Sosialisasi bisa di akses melalui link :

<https://www.facebook.com/share/v/198oXtMMHt/>

- b. Kegiatan sosialisasi kepada Puskesmas

Dokumen Video Kegiatan Sosialisasi bisa di akses melalui link :

<https://drive.google.com/file/d/1jiKo6WRvDeR->

[XCHtb3tKyXKbJfKfxHpr/view?usp=drive_link](https://drive.google.com/file/d/1XCHtb3tKyXKbJfKfxHpr/view?usp=drive_link)

c. Kegiatan pelatihan yang diikuti oleh tim koordinasi percepatan eliminasi
Dokumen Video Kegiatan Sosialisasi bisa di akses melalui link :

https://drive.google.com/file/d/1jfVJDj4vJcuqdwf4g0kPAr4QQa9Zfmx_/view?usp=drive_link

d. Kegiatan sosialisasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Dokumen Video Kegiatan Sosialisasi bisa di akses melalui link :

https://drive.google.com/file/d/1ja1kOv2HCFjtqXBJrnx5qD9L29MZNDyB/view?usp=drive_link

BAB IV

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Kunci keberhasilan suatu organisasi adalah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi dan untuk mewujudkan organisasi yang berkinerja lebih baik dan berkelanjutan dibutuhkan sosok Pemimpin transformasional. Pemimpin transformasional adalah mengubah orang dan organisasi, dengan cara menstimulus/merangsang para bawahannya untuk bekerja menghasilkan kinerja yang tinggi.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam keberlanjutan aksi perubahan adalah komitmen sumber daya manusia dan dukungan pimpinan untuk mempertahankan dan melanjutkan tindakan atau program perubahan yang sudah direncanakan dan sudah dilakukan pada tahap jangka pendek yaitu 2 bulan terhitung dari Minggu 1 Bulan Mei sampai dengan Minggu 1 Bulan Juli Tahun 2025

Hambatan keberlanjutan aksi perubahan antara lain kurangnya jumlah SDM, tingginya ketergantungan pada salah satu pihak sebagai sumber inovasi, teknologi tersedia tetapi tidak termanfaatkan maksimal, tidak ada imbalan atau insentif untuk berinovasi atau mengadopsi inovasi, rendahnya kemampuan untuk update atau perkembangan lebih lanjut.

Untuk memastikan keberlanjutan aksi perubahan ini dalam jangka menengah yang menjadi faktor utama dalam pembuatan Rencana Aksi Daerah (RAD) adalah komitmen Tim Koordinasi Percepatan Eliminasi TBC dalam melakukan pemantauan dan pendataan terhadap kegiatan penanggulangan TBC.

Dalam jangka Panjang, setelah SK Gubernur dan Rencana Aksi Daerah terbentuk sebagai dasar pembentukan Perda TBC.

Tabel 4.1. Keberlanjutan Aksi Perubahan

No.	Tahapan dan Uraian Kegiatan	Waktu	Output
B	Jangka Menengah (6 bulan)		
1.	Menyebarkan dan memberikan informasi tentang SK Gubernur Nomor 311/KPTS/DINKES/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 Mei 2025	Jumat 20 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none">· Dokumen SK· Foto
2.	Melaksanakan rapat bulanan terkait realisasi tindak lanjut SK Tim Koordinasi Percepatan Eliminasi TBC	Minggu ke-2 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none">· Surat undangan· Daftar hadir· Notulen· Foto

3.	Pembuatan SK Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah TBC Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	Minggu ke-4 Juli 2024	· Draft SK Kepala Dinas Kesehatan
4.	Melakukan Pemantauan dan pendataan lapangan terhadap eviden SK Gubernur Nomor 311/KPTS/DINKES/2025	Minggu ke- 1,2,3,4 Agustus s.d Minggu ke-1,2,3,4 September 2025	· Surat Tugas · Laporan Perjalanan Dinas
5.	Rapat koordinasi hasil pemantauan dan pendataan	Minggu ke-1 Oktober 2025	· Surat undangan · Daftar hadir · Notulen · Foto
6.	Laporan kepada mentor hasil pemantauan dan pendataan	Minggu ke-2 Oktober 2025	· Laporan hasil koordinasi · Foto
7.	Rapat terkait pembentukan Tim RAD TBC tingkat Provinsi	Minggu ke-3 Oktober 2025	· Surat undangan · Daftar hadir · Notulen · Foto
8.	Pembuatan SK Tim RAD TBC tingkat Provinsi	Minggu ke-4 Oktober 2025	· SK Kepala Daerah
9.	Rapat Koordinasi terkait peran dan tugas Tim RAD TBC	Minggu ke-1 November 2025	· Surat undangan · Daftar hadir · Notulen · Foto
10	Laporan kepada mentor hasil aksi jangka menengah	Minggu ke-1 Desember 2025	· Dokumen laporan · Foto

Milestone Jangka Panjang

No.	Tahapan dan Uraian Kegiatan	Waktu	Output
C	Jangka Panjang (12 bulan)		
1.	Mengusulkan anggaran kegiatan penyusunan regulasi Perda TBC	November 2025	· Dokumen usulan anggaran · Foto
2.	FGD dengan stakeholder terkait progres penyelenggaraan, realisasi dan kendala eliminasi TBC	Maret 2026	· Surat undangan · Daftar hadir · Notulen · Foto
3.	Sosialisasi Perda TBC	Oktober 2026	· Surat undangan · Daftar hadir · Notulen · Foto
4.	Monitoring dan Evaluasi	November 2026 sd April 2027	· Surat Tugas · Foto · Data hasil monev
5.	Laporan kepada mentor hasil aksi jangka panjang	Mei 2027	· Dokumen Laporan

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini dapat kita lihat dari pelayanan kesehatan terkait penyakit TBC, yaitu terjadinya penurunan cakupan kasus dan

kematian. Sebagai komitmen berlangsungnya aksi perubahan ini dibuat Surat pernyataan dari Kepala Dinas untuk keberlanjutan aksi perubahan jangka menengah dan jangka panjang, dapat dilihat pada gambar dibawah ini, serta didukung oleh stakeholder yang mendukung aksi perubahan ini.

Gambar 4.1. Surat Dukungan Keberlanjutan dari Mentor

 **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**
DINAS KESEHATAN
Jln. Dr. M. Ali Komp. RSUP Dr. Moch Hoesin Palembang 30126
Telp. (0711) 354915 Fax. (0711) 351749 - 321707
Website : <http://dinkes.sumselprov.go.id>
Email : office.admin@ppid-dinkes.sumselprov.go.id



**SURAT PERNYATAAN MELANJUTKAN AKSI PERUBAHAN
KE RENCANA JANGKA MENENGAH DAN RENCANA JANGKA PANJANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Ira Primadesa Ogatiyah, S.Si, M.Kes
NIP : 197412182003122004
Jabatan : Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
Instansi : Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia melanjutkan aksi perubahan yang berjudul Penanggulangan TBC melalui percepatan penyusunan tim eliminasi di Provinsi Sumatera Selatan ke Tahap Jangka Menengah dan ke Tahap Jangka Panjang.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Palembang, Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan,
Kepala Bidang P2P
Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Selatan


Ira Primadesa Ogatiyah, S.Si, M.Kes
NIP. 197412182003122004

 **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**
DINAS KESEHATAN
Jln. Dr. M. Ali Komp. RSUP Dr. Moch Hoesin Palembang 30126
Telp. (0711) 354915 Fax. (0711) 351749 - 321707
Website : <http://dinkes.sumselprov.go.id>
Email : office.admin@ppid-dinkes.sumselprov.go.id




**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN MELANJUTKAN AKSI PERUBAHAN
KE RENCANA JANGKA MENENGAH DAN RENCANA JANGKA PANJANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferry Fahrizal SKM, MKM
NIP : 196802191990031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
Instansi : Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel

Dengan ini menyatakan selaku mentor bahwa saya bersedia mendukung aksi perubahan yang berjudul Penanggulangan TBC melalui Percepatan Penyusunan Tim Eliminasi di Provinsi Sumatera Selatan ke Tahap Jangka Menengah dan ke Tahap Jangka Panjang di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Juni 2025
Mentor,

Ferry Fahrizal, SKM, MKM
NIP. 196802191990031001

BAB V

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Pemanfaatan mata pelatihan pilihan dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan yang memuat uraian singkat substansi mata pelatihan pilihan apa saja yang diambil, proses delivery-nya. Menjelaskan proses adopsi, adaptasi, hubungan dari mata pelatihan pilihan dalam implementasi aksi perubahan. Penjelasan tentang keterkaitan mata pelatihan pilihan dengan aksi perubahan ini dapat dilihat pada tabel 5.1

Dalam substansi mata Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA Smart Governance) ada beberapa kelompok mata pilihan pembelajaran, diantaranya:

1. Mata Pelatihan Inti
 - a. Agenda Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme
 - b. Agenda Kepemimpinan Kinerja
 - c. Agenda Manajemen Kinerja
 - d. Agenda Aktualisasi Kepemimpinan Kinerja.
2. Mata Pelatihan Dasar
 - a. Self Resilience
 - b. Keterampilan Digital
 - c. Berfikir Kritis
3. Mata Pelatihan Pilihan
 - a. Manajemen Pemerintah Daerah
 - b. Anti Korupsi
 - c. Undang-Undang Cipta Kerja
 - d. Hak Asasi Manusia
 - e. Pemeriksaan Keuangan
 - f. Narkoba
 - g. Perencanaan Pembangunan Nasional
 - h. Pertumbuhan Ekonomi Hijau
 - i. Menguasai Seni Berkomunikasi Dalam Hubungan Kerja
 - j. Mengaktifkan Transformasi Digital Dalam Pada Sektor Pemerintahan
 - k. Membangun Kepekaan pada Isu GEDSI di Lingkungan Kerja
 - l. Merumuskan Kebijakan Publik Menggunakan Big Data Analisis
 - m. Design Thinking Dalam Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan

- n. Membina Kerjasama Tim
- o. Memahami Collaborative Government sebagai Basis Strategi Kerjasama Luar Negeri
- p. Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme
- q. Mata Pelatihan Lain Yang relevan

Tabel 5.1 Keterkaitan mata pelatihan pilihan dengan aksi perubahan

No.	Judul Proyek/ Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dgn Proyek/Aksi Perubahan	Bukti	Sumber Pembelajaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penanggulangan TBC melalui percepatan penyusunan Tim Eliminasi di Provinsi Sumatera Selatan	<p>Pengelolaan Kepentingan Konflik</p> <p>Kepemimpinan Nasional Tingkat II - Mengelola Hubungan Kerja Produktif Antar Generasi</p> <p>Membangun Branding Yang Berkelanjutan Pada Organisasi Pemerintah</p>	Mandiri online	<ul style="list-style-type: none"> - Gaya kepemimpinan - Perubahan dan Pengembangan Organisasi - Transformasi Organisasi - Komunikasi Pemerintah - Akuntabilitas Pemerintah - Sistem Akuntabilitas Pemerintah - Perencanaan Karier dan Pengembangan Potensi Diri - Strategi komunikasi Pemerintah dan Tim kelola 	<p>https://drive.google.com/drive/folders/15zUsYOqy3a6cpV2ttaaBDApOM3rBTCrf</p>	<p>Modul Manajemen Pemerintah an Dian Cita Sari, Robert Tua Siregar, Marto Silalahi, Marisi Butarbutar Hery Pandapotan Silitonga, Heldy Vanni Alam, Ali Zaenal Abidin Falimu, Abdul Rahmat, Anggota IKAPI, No.</p>

				Komunikasi Pemerintah		0001/ikapi/ gtlo/II/14, Tahun 2020
2.		Penyusunan Kebijakan Percepatan Eliminasi TBC	Mandiri offline	-Kebijakan dan Starategi Nasional Penanggulanga n TBC Penyusunan SK Tim Percepatan Eliminasi TBC -Landasan Hukum Penyusunan Perda TBC Penyusunan Rancangan Perda TBC	https://drive.google.com/drive/folders/15zUsYOqy3a6cpV2ttaaBDApOM3rBTCrf	UU Kesehatan nomor 17 tahun 2023 PP RI nomor 67 tahun 2021 tentang penanggula ngan TBC Stranas Penanggul angan TBC tahun 2020 – 2024

BAB VI

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

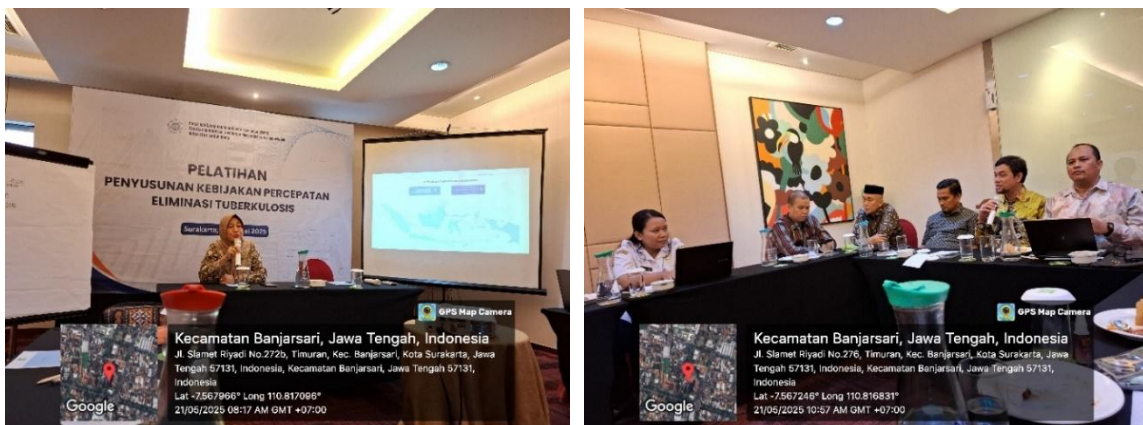
Diseminasi dapat diartikan sebagai proses penyebaran informasi atau pengetahuan kepada khalayak luas. Diseminasi adalah proses yang bertujuan untuk menyebarkan hasil inovasi/aksi perubahan ke dalam masyarakat umum, baik melalui publikasi, presentasi, maupun aktivitas lainnya, misalnya dukungan stakeholder

Pada bab VI ini, memuat penjelasan terkait dengan kemampuan peserta dalam mengkomunikasikan dan mendapatkan dukungan inovasi atau adopsi aksi perubahan. Menggambarkan kemampuan peserta dalam mengembangkan strategi diseminasi dan publikasi yang tepat dan modern berbasis media dan/atau media sosial serta bagaimana peserta mendapatkan dukungan stakeholders secara maksimal.

A. PENERAPAN STRATEGI KOMUNIKASI

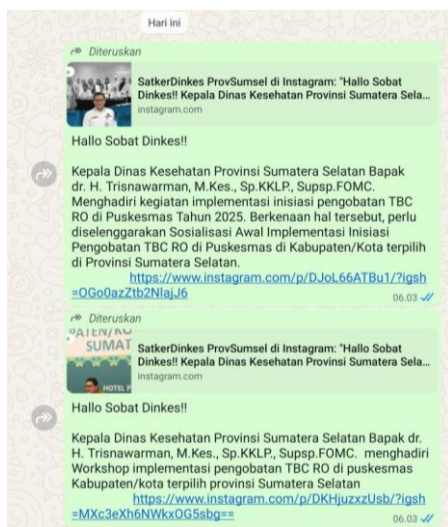
Dalam penerapan strategi komunikasi diseminasi dan publikasi dalam penerapan aksi perubahan akan memanfaatkan ragam media cetak seperti spanduk, baliho, foto, media elektronik seperti radio, televisi; dan media sosial, antara lain melalui Facebook, Instagram dan Youtube.

- Sosialisasi melalui media cetak seperti foto





- Sosialisasi melalui media social Instagram



B. KEBERHASILAN MENDAPAT DUKUNGAN ADOPSI/REPLIKASI AKSI PERUBAHAN

Memuat respon/tanggapan/testimoni terhadap desiminasi/publikasi aksi perubahan dan Keberhasilan mendapat dukungan adopsi replikasi aksi perubahan dalam implementasi aksi perubahan jangka pendek dilakukan pada Stakeholder internal dan stakeholder eksternal yang terkait .

Dukungan Aksi perubahan Penanggulangan TBC melalui Percepatan Penyusunan Tim Eliminasi di Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan dukungan 7 Mitra kerja stakeholder eksternal, yaitu sebagai berikut

- 1) Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
- 3) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 4) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- 5) Media Massa

- 6) Akademisi (Poltekes Pakembang)
- 7) Masyarakat

Sedangkan dukungan stakeholder Internal mendapatkan 3 (tiga) mitra kerja, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Sekretariat GF Program TBC
- 3) Tim kerja TBC

Penerapan strategi komunikasi dan keberhasilan dukungan dapat dilihat pada link:

<https://www.facebook.com/share/v/198oXtMMHt/>

<https://drive.google.com/drive/folders/1j4KeTdlVYmoRzfp6fOQnFVv40sYEHBUp>

BAB VII

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Dalam implementasi aksi perubahan, peserta juga melaksanakan kegiatan pengembangan potensi berdasarkan penilaian yang telah dibuat oleh Mentor terkait rencana pengembangan potensi diri dengan nilai yang paling rendah disetiap komponennya. Pada hasil penilaian pemetaan sikap perilaku kepemimpinan yang merupakan hasil penilaian gabungan peserta dan mentor dan nilai akhir yang mempunyai nilai rendah diantaranya pada komponen dan subkomponen:

1. Integritas (Tanggungjawab)
2. Kerjasama (Komitmen dalam tim)
3. Mengelola Perubahan (Orientasi pada hasil)

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Nama	: Ira Primadesa Ogatiyah,S.Si,M.Kes	Nama	: Fery Fahrizal, SKM,
		Mentor	MKM
NIP	: 197412182003122004	NIP	: 19680219 199003 1001
Jabatan	: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Jabatan	: Sekretaris
Instansi	: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	Instansi	: Dinas Kesehatan Prov.Sumsel
Program	: Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2025		

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata- Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	9	9.00	Istimewa
	Komitmen	9	9	9.00	Istimewa
	Kedisiplinan	8	8	8.00	Baik
	Kejujuran	7.5	8	8.00	Baik
	Konsistensi	8	8	8.00	Baik

	Pengambilan Keputusan	8	8	8.00	Baik
	Rata-Rata	8.25	8.33	8.31	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	7.5	8	7.85	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	8	8.00	Baik
	Komunikasi	8	8	8.00	Baik
	Fleksibilitas	8	8	8.00	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	8	8.00	Baik
	Rata-Rata	7.90	8.00	7.97	Baik
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	8	8	8.00	Baik
	Adaptabilitas	7.5	8	8.00	Baik
	Pengembangan orang lain	8	8	8.00	Baik
	Orientasi pada hasil	8	8	8.00	Baik
	Inisiatif	8	8	8.00	Baik
	Rata-Rata	7.90	8.00	7.97	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.02	8.11	8.08	Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10 Istimewa

7-8.99 Baik

5-6.99 Cukup

3-4.99 Kurang

1-2.99 Sangat Kurang

Pada waktu implementasi sudah dilaksanakan dengan strategi pengembangan potensi diri dalam memenuhi level kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja pelayanan untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas yang telah direncanakan, sebagaimana terdapat pada tabel 7.1

Tabel 7.1. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

No	Komponen/Sub Komponen	Kegiatan Pengembangan Potensi Diri untuk Mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan	Kegiatan / Tahapan Aksi Perubahan	Waktu Pelaksanaan		Hasil
				Rencana	Realisasi	
I.	Integritas/Tanggung Jawab Memberikan apresiasi dan teguran kepada anggota/anak buah yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi	Bersama-sama dengan tim dalam Menyusun SOP sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan pelayanan TBC sehingga dapat bertindak sesuai nilai, norma dan etika Sebagai narasumber untuk meningkatkan kompetensi Tim sehingga dapat bekerja secara optimal.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat draft SK Gubernur untuk penanggulangan TBC • Pelatihan untuk Kompetensi Tim 	Minggu ke- 1 Mei 2025 Minggu ke-3 Mei 2025	6 Mei 2025 21-22 Mei 2025	Dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan draft SK (terlampir) Menghasilkan Tim Kompeten dengan sertifikat (terlampir)
II.	Kerjasama/Komitmen Dalam Tim Mengutamakan pengambilan Keputusan berdasarkan Keputusan Bersama dari anggota tim	Mengkoordinasikan bersama tim dan stakeholder dalam mengambil Keputusan dan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rapat Bersama stakeholder tentang komitmen penanggulangan TBC 	Minggu ke-2 Mei 2025	9 Mei 2025	Komitmen Bersama dalam penanggulangan TBC (terlampir)
III	Mengelola Perubahan/Orientasi Pada Hasil	Sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Sosialisasi tentang tahapan pembentukan SK 	Minggu ke-2 dan ke-4 Juni 2025	14 Mei 2025, 26 Mei 2025, 16 - 26 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat, puskesmas dan petugas pj program berkompet

	Bekerja untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan meningkatkan kinerja organisasi	Mengidentifikasi, mengevaluasi dan monitoring kinerja sekretariat pelayanan TBC	Tim Percepatan Eliminasi TBC		• 20 Juni 2025	en (terlampir)
--	--	---	------------------------------	--	----------------	----------------

BUKTI KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

1) Integritas atau tanggung jawab :

- . Membuat draft SK Gubernur untuk penanggulangan TBC

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 311 /KPTS/DINKES/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah bagi kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian, serta berdampak pada penurunan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan adanya penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Tingkat Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur;
 - bahwa dalam rangka melakukan percepatan penanggulangan dan Eliminasi Tuberkulosis perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien, serta berkesinambungan dari Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat;
 - bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 311 /KPTS/DINKES/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah bagi kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian, serta berdampak pada penurunan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan adanya penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Tingkat Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur;
 - bahwa dalam rangka melakukan percepatan penanggulangan dan Eliminasi Tuberkulosis perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien, serta berkesinambungan dari Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat;
 - bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

-3-

- memberikan panduan bagi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC) secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan menuju eliminasi Tuberkulosis 2030, yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan, pencatatan pelaporan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga, dan masyarakat.

- KETIGA : Rincian tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **27** **III** 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
3. Panglima Komando Daerah Militer II/Sriwijaya di Palembang
4. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 311/KPTS/DINKES/2025
 TANGGAL : 27 MEI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Pengarah
 - a. Ketua : Gubernur Sumatera Selatan
 - b. Anggota :
 - 1) Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
 - 2) Panglima Komando Daerah Militer II/Sriwijaya
 - 3) Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 4) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan
 - 5) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumasel.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
 - a. Bidang Perencanaan, Koordinasi, dan Konvergensi :
 - Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 2) Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 3) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 4) Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
 - 5) Kepala Bagian Penyusunan Keputusan Gubernur dan Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 6) Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERASELATAN
 NOMOR : 311/KPTS/DINKES/2025
 TANGGAL : 27 MEI 2025

RINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Tim Pengarah
 - a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Ketua
 - a. memimpin seluruh kegiatan Tim sebagai upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis di Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - b. melaporkan kegiatan penanggulangan tuberkulosis kepada Gubernur Sumatera Selatan.
3. Wakil Ketua
 - a. mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim sebagai upaya percepatan penanggulangan TBC di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. memimpin pembahasan rumusan usulan, prioritas, sasaran, strategi perencanaan, dan monitoring evaluasi pencapaian penanggulangan TBC di Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan TBC bagi masyarakat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. memonitoring dan mengevaluasi perkembangan penanggulangan TBC di Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua.
4. Sekretaris
 - a. menyusun dokumen rencana kerja dan agenda kerja Tim;
 - b. memfasilitasi kebutuhan administratif Forum;

. Pelatihan untuk kompetensi tim



2) Kerjasama atau komitmen dalam tim :

. Melakukan rapat bersama stakeholder tentang komitmen penanggulangan TBC



3) Mengelola Perubahan atau Orientasi Pada Hasil :

. Melakukan sosialisasi tentang tahapan pembentukan SK Tim Percepatan Eliminasi TBC



BAB VIII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Indonesia saat ini menempati peringkat ke dua di dunia berdasarkan estimasi insiden TBC dengan estimasi 969.000 kasus. Pada tahun 2024, Indonesia berhasil menotifikasi 884.980 kasus TBC dengan 11.900 kasus diantaranya merupakan kasus TB RO (tuberkulosis resisten obat). Namun demikian hanya 9195 pasien (77 %) yang memulai pengobatan.

Implementasi aksi perubahan dengan judul Penanggulangan TBC Melalui Percepatan Penyusunan Tim Eliminasi di Povinsi Sumatera Selatan, telah dilaksanakan dalam kegiatan jangka pendek sebagai berikut:

- 1) Mendapat dukungan dari mentor dalam melaksanakan rangkaian aksi perubahan.
- 2) Tim koordinasi yang dibentuk mendukung dan bekerjasama dalam persamaan persepsi.
- 3) Stakeholder dalam aksi perubahan yaitu promotor, latern, defenders maupun apathetic berkomitmen untuk mendukung penanggulangan TBC baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dibuktikan dengan video dukungan.
- 4) Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor 311/KPTS/DINKES/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 Mei 2025 disusun sebagai standar proses pencapaian eliminasi TBC di Provinsi Suamtera Selatan.
- 5) Meningkatkan Kompetensi Tim Percepatan Eliminasi dengan pelatihan untuk melaksanakan pelayanan optimal dan terukur.
- 6) Melakukan Sosialisasi tentang penyakit TBC kepada masyarakat, Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui media cetak media elektronik dan media sosial (FB, Instagram dan Youtube).

Hasil Implementasi sesuai dengan tujuan dan manfaat aksi perubahan yaitu:

- Penanggulangan TBC harus dilaksanakan bersama tim koordinasi dan stakeholder terkait

- Tersampainya informasi dan pemahaman masyarakat, Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SK Gubernur Nomor 311/KPTS/DINKES/2025
- Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia pelaksana program tuberkulosis sehingga terjadi efisiensi
- Terdapat pergeseran stakeholder

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dan direkomendasikan untuk perbaikan dan penyempurnaan pasca implementasi aksi perubahan ini, antara lain:

- 1) Melakukan pendataan dan penemuan kasus TBC sesuai target Kemenkes
- 2) Memperbanyak dan meningkatkan SDM yang berkompeten
- 3) Memberikan pendampingan/in house training kepada Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

Kemkominfo Ri Tahun 2023, Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Modul Sosialisasi (V.1.0) Literasi Digital Sektor Pemerintahan

LAN.a (2021), Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator: Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila dan Integritas.

LAN.b (2021), Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator: Bela Negara Kepemimpinan Pancasila.

LAN.c (2021), Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator: Akuntabilitas Kinerja.

LAN.d. (2021), Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator: Kepemimpinan Transformasional.

LAN.e (2021), Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator: Hubungan Kelembagaan.

LAN.f (2021), Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator: Manajemen Keuangan Negara.

LAN.g (2021), Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator: Manajemen Kinerja.

LAN.h (2021), Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator: Manajemen Resiko.

LAN.i (2021), Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator: Organisasi Digital.

LAN.j (2021), Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator: Standar kinerja Pelayanan.

Modul Manajemen Pemerintahan Dian Cita Sari, Robert Tua Siregar, Marto Silalahi,
Marisi Butar Hery Pandapotan Silitonga, Heldy Vanni Alam, Ali Zaenal Abidin
Falimu, Abdul Rahmat, Anggota IKAPI, No. 0001/ikapi/gtlo/II/14, Tahun 2020.